

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TERHADAP BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR**



SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Septavian K.A.Y

Nomor Mahasiswa : 03312025

Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAPATAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TERHADAP BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Septavian K.A.Y

No Mahasiswa : 03312025

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 07 Mei 2007

Penyusun,

(Septavian K.A.Y)

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAPATAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TERHADAP BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

Hasil Penelitian

diajukan oleh

Nama : Septavian K.A.Y

Nomor Mahasiswa : 03312025

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal ..08/05/07

Dosen Pembimbing,

(Drs. Muqodim MBA, Ak.)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

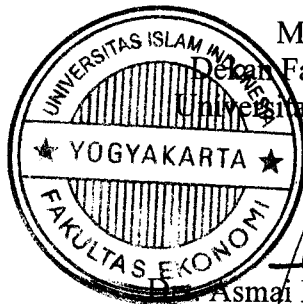
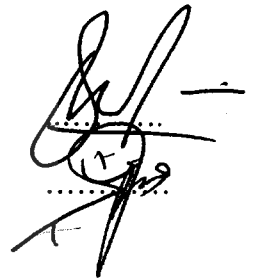
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Disusun Oleh: **SEPTAVIAN KRISNANINGANNGARA YUDHA**
Nomor mahasiswa: 03312025

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 19 Juni 2007

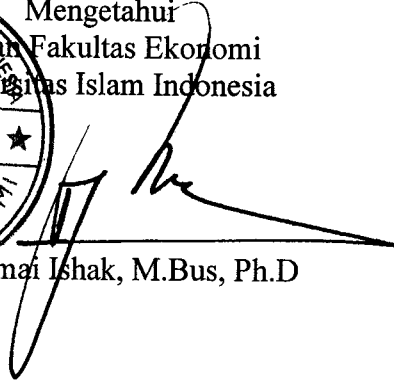
Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Muqodim, MBA, Ak

Penguji : Dra. Primanita Setyono, MBA, Ak



Mengetahui
Dean Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D



PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan Karya Ini Untuk
Ayahanda dan ibunda yang sangat Kucintai
Kakak-Kakakku yang Sangat Kusayangi*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S-1) di fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas karunia, hidayah, akal dan fikiran serta atas segala kemudahan yang telah diberikan selama penelitian ini berlangsung samapai dengan akhir penelitian..
2. Nabi Muhammad SAW beserta junjungannya yang memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga kepada umat.
3. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Asma'i Ishak, M. Bus.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
5. Ibu Dra. Erna Hidayah M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak **Drs. Muqodim MBA, Ak**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan petunjuk dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Kepada ayahanda tercinta **H. Notantyo Krissworo SH** dan ibunda tercinta **Hj. Sri Indrattiningsih**, atas do'a, kasih sayang, dorongan, kepercayaan, nasehat, dan bantuan baik material maupun spiritual yang telah diberikan selama ini kepada ananda. Semoga skripsi ini dapat menjadi tanda terima kasih dan bakti ananda atas segala apa yang kalian berikan demi kebaikan dan keberhasilan ananda.
8. Kakak-kakakku tersayang **Octavian Eko, Iin, Juniartian dan Aan Mardianasari** yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang dan cinta yang berlimpah selama hidupku. Dan selama ini sudah menjadi kakak yang baik bagiku.
9. Teman-teman seperjuangan class B yang selalu bersama dalam susah maupun senang dan sekaligus telah menjadi keluargaku selama di Yogyakarta, **Bohaiy, Aqi2, Hayu, Sisi, Ling-Ling, Vivi, Uwiek, Galuh, Dedi, Ima, Anwar, Danan, B'genk, Kommeng, Fatah, Ayie, Leo, Nunu, Fuad, Agung, Tyo'**, Puri dan teman-teman kelas B lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, *Luv u all, "thanks for all in a part of my life"*.
10. Tidak lupa saya sangat berterimakasih banyak untuk **Diah Ayu Kusumadewi** yang selalu hadir dalam hidupku dalam suka maupun duka yang sudah banyak membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman serumahku, Mas Andri, Kharis dan Wisnu yang sudah banyak memberikan masukan-masukan buat skripsiku, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, thanks buat semuanya.

12. Dan semua pihak yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan karya tulis ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Yogyakarta, 07 Mei 2007

Penulis

(Septavian K.A.Y)

DAFTAR ISI

HALAMAN	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
Abstrak.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak Secara Umum	8
2.2 Pendapatan Asli Daerah	10
2.2.1 Pajak Daerah	11
2.2.2 Retribusi Daerah.....	11
2.2.3 Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah.....	12
2.2.4 Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	12
2.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	13
2.3.1 Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	13
2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan BBNKB dan BBNKBKAA	14
2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14
2.3.4 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	15
2.3.5 Bukan Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	16
2.3.6 Dasar Pengenaan Pajak Bea balik Nama kendaraan Bermotor.....	16
2.3.7 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	16
2.3.8 Perhitungan BBNKB.....	18
2.3.9 Waktu Pendaftaran dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18
2.4 Penelitian Terdahulu dan Formulasi Hipotesis	19

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Sample Penelitian.....	26
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	27
3.3 Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4 Populasi dan Sampel	35
3.5 Alat Analisis.....	36
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	36
3.5.2 Regresi Berganda.....	37
3.5.3 Pengujian Hipotesis.....	38

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif.....	43
4.2 Uji Asumsi Klasik	45
4.2.1 Uji Multikolinearitas	46
4.2.2 Uji Autokorelasi.....	47
4.2.3 Uji Heterokedastisitas	48
4.3 Hasil Regresi	50
4.3.1 Pengujian Hipotesis.....	52
4.3.1.1 Uji F	52
4.3.1.2 Uji t	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Keterbatasan	61
5.3 Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	66
----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
3.1 Daftar UPPD Propinsi Jawa Tengah.....	26
4.1 Statistik Diskriptif.....	43
4.2 Uji Multikolinearitas dengan Matrik Korelasi	45
4.3 Pengambilan keputusan autokorelasi	46
4.4 Hasil Uji Durbin-Watson.....	47
4.5 Hasil Uji Koefisien Regresi Berganda.....	49
4.6 Koefisien Determinasi.....	51
4.7 Uji F.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
4.1 Grafik Scatterplot.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Ringkasan Penerimaan BBN-KB I Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah.....	67
2. Perkembangan Harga BBM.....	71
3. Jumlah Kendaraan Bermotor Baru di Propinsi Jawa Tengah.....	76
4. Hasil Regresi.....	81



**" Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Daerah Propinsi
Jawa Tengah terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor "**

ABSTRAK

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Tengah. Variabel yang diteliti adalah variabel bebas yang meliputi kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor, serta perubahan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah dan variabel terikat yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris apakah kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor, serta perubahan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah berpengaruh terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini menggunakan objek penelitian laporan bulanan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan data yang digunakan adalah data tahun 2001 sampai dengan 2005. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yang terdiri dari variabel kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor, serta perubahan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah berpengaruh signifikan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Keywords : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor, dan perubahan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam suatu daerah tidak terlepas dari sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah menurut UU No.25 Tahun 1999 adalah pendapatan asli daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah lain yang sah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendapatkan dana dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang penting dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999, Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil laba perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lain yang sah.

Pajak dapat dibagi menjadi dua menurut pemungut pajaknya, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi berupa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kota atau kabupaten berupa Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan lain-lain. Tapi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak yang diterima oleh pemerintah setiap tahun bisa mengalami kenaikan ataupun penurunan. Keadaan yang bisa mempengaruhi kenaikan dan penurunan jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah propinsi dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor seperti kenaikan harga BBM, perubahan peraturan-peraturan pemerintah tentang pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor di suatu daerah, pendapatan masyarakat, harga jual kendaraan bermotor serta tingkat ekonomi masyarakat, perekonomian suatu negara, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi omzet penjualan kendaraan bermotor yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kenaikan harga BBM sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005 telah mengalami kenaikan sebanyak 4 kali. Kenaikan harga BBM tersebut mempengaruhi pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah mengalami penurunan karena dengan kenaikan harga BBM yang cukup tinggi yang kemudian juga diikuti dengan naiknya semua harga yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat dan juga yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, akibatnya

masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu daripada membeli kendaraan bermotor. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor mengakibatkan pendapatan daerah di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah perubahan peraturan-peraturan pemerintah tentang pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta jumlah kendaraan bermotor yang ada di suatu daerah. Faktor perubahan peraturan-peraturan pemerintah tentang pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor juga dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor baru.

Sedangkan untuk tingkat perekonomian suatu negara, tingkat ekonomi masyarakat dan faktor-faktor lainnya mempunyai pengaruh yang tidak begitu besar terhadap pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selain itu, dalam hal pengukuran faktor-faktor tersebut akan sulit dilakukan karena data yang ada kurang lengkap atau bahkan tidak tersedianya data yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor”**.

2. Rumusan Masalah

Sepanjang yang diketahui penulis, belum pernah ada penelitian tentang factor-faktor yang mempengaruhi perubahan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah berikut ini :

1. Seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor yang ada di suatu daerah serta perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tentang pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Tengah?
2. Dari ketiga faktor tersebut, faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Tengah?

3. Batasan Masalah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Propinsi. Jenis kendaraan bermotor yang dipungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ada 2 macam yaitu kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor lama. Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi jenis kendaraan bermotor yang dipungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor baru.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat mengalami perubahan jika faktor-faktor yang berhubungan dengan kendaraan bermotor juga mengalami perubahan yang kemudian mempengaruhi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut. Terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kendaraan bermotor yang dapat mempengaruhi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara lain kenaikan harga BBM, perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tentang pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor yang ada di suatu daerah, tingkat ekonomi masyarakat, harga jual kendaraan bermotor, tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Namun dalam penelitian ini penulis hanya akan melakukan penelitian terhadap 3 jenis faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu kenaikan harga BBM, perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor yang ada di suatu daerah.

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor meliputi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Propinsi yang mengatur tentang BBNKB & KAA, dan Keputusan Gubernur atau Peraturan Gubernur yang mengatur tentang BBNKB & KAA

sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang BBNKB & KAA pada propinsi dimaksud. Dalam penelitian ini, hanya Keputusan Gubernur atau Peraturan Gubernur tentang BBNKB & KAA saja yang akan di bahas lebih lanjut.

Kemudian, kendaraan bermotor dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di pisahkan menjadi dua, yang meliputi : kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor di atas air. Hanya kendaraan bermotor saja yang akan di bahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Sedangkan kendaraan bermotor sendiri juga dipisahkan menjadi beberapa jenis, yaitu, kendaraan bermotor bukan umum, kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Ketiga jenis kendaraan bermotor diatas akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini dan juga kendaraan bermotor yang akan di teliti akan dibatasi hanya kendaraan bermotor baru atau penyerahan pertama.

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor yang ada di suatu daerah serta perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tentang pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Untuk mengetahui dari ketiga faktor diatas, faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi :

a. Pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah

Penulis ingin mencoba untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah bahwa faktor-faktor manakah yang berpengaruh paling besar terhadap penerimaan pendapatan daerah di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan adanya penelitian ini maka jika faktor-faktor yang berhubungan dengan kendaraan bermotor mengalami perubahan, pemerintah dapat mengantisipasi dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kendaraan bermotor tersebut yang nantinya akan berdampak pada perubahan penerimaan pendapatai daerah.

b. Penulis

Diharapkan memperoleh pengalaman dan menerapkan teori ke dalam suatu bentuk penelitian dan menambah wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah di sektor pajak khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak Secara Umum

Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak sudah ada sejak jaman dahulu kala walaupun pada saat itu belum dinamakan pajak namun masih pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh negara. Dengan kata lain pajak yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, hal ini adalah wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yaitu untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya maupun untuk melaksanakan pembangunan.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai azasnya , jenis pajak yang berlaku, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban wajib pajak.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.j.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" (1991:2) "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya "Dasar dasar Hukum Pajak dan pajak Pendapatan" (1990:5) adalah sebagai berikut "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan budgeter, yaitu mengatur.

B. Pendapatan Asli daerah

Pembangunan di Indonesia mempunyai tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunannya selalu direncanakan serta dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal yang ditujukan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan tersebut.

Peranan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah diberi hak mengatur rumah tangganya sendiri, mencerminkan berlakunya asas otonomi daerah. Tujuan diberikannya otonomi daerah adalah memungkinkan daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah dibutuhkan dana yang besar, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut penerimaan pemerintah daerah merupakan sumber utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.

3. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah.
4. Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pungutannya berada pada pemerintah daerah, baik ditingkat Propinsi, Kabupaten, dan Kota yang hasil pungutannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, Pajak Propinsi meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten dan Kota meliputi : Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan Pajak Parkir.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai penyerahan atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Berhubungan dengan hal tersebut maka perusahaan daerah didasarkan atas asas ekonomi perusahaan yang sehat, atau dengan kata lain perusahaan daerah harus melakukan kegiatan secara berhasil guna dan berdaya guna. Dalam hal ini perlu dicegah adanya kecenderungan ke arah sistem serba negara (etatisme) dan monopoli.

Tujuan perusahaan daerah berdasarkan kategori sasarannya, dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu :

- a. Perusahaan Daerah yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, yaitu perusahaan daerah yang mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.
- b. Perusahaan Daerah yang bertujuan meningkatkan PAD, yaitu memberikan dukungan dalam sumbangan bagi ekonomi daerah.

4. Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan lain-lain ini merupakan hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha perangkat pemerintah daerah dan bukan merupakan hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas dan kewenangan perangkat daerah yang lebih tinggi.

Penerimaan ini adalah hasil penerimaan daerah yang diperoleh dari penerimaan luar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, lain-

lain usaha yang sah ini di satu pihak lebih mengarah pada public service dan bersifat penyuluhan.

C. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBN-KB adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atas perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menetapkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air telah dicakup didalamnya, tapi dengan adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 bahwa kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air di pisahkan.

Pengenaan BBNKB dan BBNKBKAA tidak mutlak ada pada seluruh propinsi di Indonesia, tapi ada pada pemerintah propinsi yang mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak propinsi. Pemerintah propinsi mempunyai kebebasan untuk menetapkan apakah BBNKB dan BBNKBKAA ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah yang terpisah.

2. Dasar Hukum Pemungutan BBNKB dan BBNKBKAA

Pemungutan BBNKB dan BBNKBKAA di Indonesia mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan BBNKB dan BBNKBKAA di suatu propinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Daerah propinsi yang mengatur tentang BBNKB dan BBNKBKAA. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk BBNKB dan BBNKBKAA, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang BBNKB dan Peraturan Daerah tentang BBNKBKAA.
- 4) Keputusan Gubernur yang mengatur tentang BBNKB dan BBNKBKAA sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang BBNKB dan BBNKBKAA pada propinsi dimaksud.

3. Subjek dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- a. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

- b. **Wajib Pajak Bea Balik nama Kendaraan Bermotor** adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

4. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, termasuk hibah wasiat atau hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :

- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
- b. Untuk diperdagangkan.
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia (pengecualian tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabeab Indonesia.
- d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.

5. Bukan Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dikecualikan sebagai objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Kedutaan, konsulat perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik
- c. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

6. Dasar Pengenaan Pajak Bea balik Nama kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tabel Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. Jika NJKB belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur menetapkan NJKB dengan keputusan gubernur, dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

7. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dikenakan atas penyerahan Kendaraan bermotor dibedakan menjadi tiga jenis tarif, yaitu :

- a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
1. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 2. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 3. 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :
1. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 2. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 3. 0.3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- c. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :
1. 0.1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 2. 0.1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 3. 0.03% (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

8. Perhitungan BBNKB

Besarnya pokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum dapat dibuat rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}\end{aligned}$$

9. Waktu Pendaftaran dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Orang atau badan, ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi SPT, selambat-lambatnya :

- a. 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik untuk pemilikan baru.
- b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar kota.
- c. 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib lapor kepada Gubernur atas terjadinya penyerahan.

Kewajiban membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terhutang :

Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan saat pendaftaran, setelah nota pajak/SKP diterbitkan. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan. Besarnya pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan jenis penyerahan dengan dasar pengenaan pajak atau nilai penyerahan. Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.

D. Penelitian Terdahulu dan Formulasi Hipotesis

1. Hubungan antara faktor kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor dan perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tentang pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor.

Pendapatan asli daerah di sektor bea balik nama kendaraan bermotor akan mengalami penurunan atau kenaikan apabila faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mengalami penurunan atau kenaikan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor antara lain kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor dan perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tentang pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Apabila harga BBM mengalami kenaikan maka pendapatan BBNKB akan mengalami kenaikan, sebab walaupun harga BBM naik, masyarakat akan tetap menggunakan kendaraan bermotor untuk sarana mobilisasi tapi kendaraan bermotor yang digunakan akan lebih banyak khususnya dari kendaraan bermotor roda 2. Sehingga pendapatan BBNKB akan lebih banyak di peroleh dari sektor kendaraan roda 2. Untuk jumlah kendaraan bermotor, apabila jumlah kendaraan bermotor semakin banyak, maka pendapatan BBNKB juga akan semakin besar. Sedangkan untuk perubahan Peraturan Gubernur, peraturan ini mengatur tentang besarnya keringanan BBNKB yang akan dikenakan kepada Wajib pajak kendaraan bermotor. Peraturan ini berisi tentang besarnya pengenaan BBNKB dengan nilai persentase untuk setiap jenis kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor akan mendapat keringanan BBNKB yang berbeda. Jika suatu jenis kendaraan bermotor

memperoleh keringanan pembayaran BBNKB maka pendapatan BBNKB akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Dari pengaruh yang disebabkan dari masing-masing ketiga faktor tersebut, maka secara bersama-sama ketiga faktor tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan BBNKB. Atas dasar hal ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor dan Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Kenaikan Harga BBM

Pada penelitian Y. Sri Susilo (2002) tentang dampak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) terhadap kinerja ekonomi makro bahwa beberapa tahun terakhir pemerintah telah menerapkan kebijakan penurunan subsidi BBM dan TDL. Penurunan subsidi tersebut membawa konsekuensi kenaikan harga BBM dan TDL. Dengan adanya penurunan subsidi yang berarti kenaikan harga BBM tersebut dapat dipastikan menimbulkan apa yang disebut dengan efek spiral. Efek spiral yang bakal muncul adalah adanya kenaikan harga semua barang dan jasa. Sektor yang langsung terpengaruh oleh kenaikan harga BBM adalah sektor transportasi dan industri.

Kemudian pada penelitian Sri Susilo (1999) tentang dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian secara sektoral dan makro, bahwa angka-angka dari hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan subsidi BBM yang berakibat kenaikan harga BBM sebesar 40% membawa dampak kecenderungan negatif terhadap perekonomian secara makro, sektoral dan regional. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa hasil temuan dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara keseluruhan dapat dianggap tidak berbeda, baik dari besaran maupun tanda dari koefisien perubahan.

Selanjutnya dari sisi pertumbuhan, kenaikan harga BBM, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Kondisi tersebut ditandai oleh penurunan konsumsi riil, investasi riil, ekspor agregat, impor agregat dan employment.

Dari penelitian diatas telah membuktikan bahwa kenaikan harga BBM mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara makro. Secara mikro, kenaikan harga BBM dapat mengakibatkan pendapatan masyarakat akan mengalami penurunan, harga barang kebutuhan hidup juga akan mengalami kenaikan, akan semakin banyak orang yang jatuh miskin karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tentunya juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di segala sektor. Penerimaan atau pendapatan asli daerah di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga terpengaruh oleh kenaikan harga BBM ini. Atas dasar hal ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Jumlah Kendaraan Bermotor

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di suatu daerah tergantung dari jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan nomor polisi daerah tersebut atau banyaknya kendaraan bermotor yang memakai nomor polisi daerah tersebut akan tetapi di gunakan di daerah lain atau di luar daerah dimana kendaraan tersebut di daftarkan pajaknya pada kantor SAMSAT asal nomor polisi kendaraan tersebut. Untuk setiap penambahan jumlah kendaraan bermotor baru maka pendapatan BBNKB juga akan mengalami kenaikan. Kenaikan ini tentunya lebih besar daripada penambahan kendaraan bermotor dari penyerahan kedua dan penyerahan selanjutnya. Atas dasar hal ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4. Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selalu didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah Tingkat I untuk menyusun Peraturan pelaksanaannya, yang sering disebut juga Peraturan Gubernur.

Perubahan ini selalu terjadi setiap tahun. Perubahan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dalam membayar kewajibannya sebagai pengguna kendaraan bermotor.

Pendapatan daerah untuk sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan mengalami kenaikan atau penurunan, tergantung dari besarnya keringanan yang diberikan kepada masyarakat dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.

Peraturan Gubernur ini mengukur besarnya keringanan BBNKB yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor pada saat mendaftarkan kendaraan bermotornya pada kantor SAMSAT. Keringanan BBNKB ini diukur dengan nilai persentase, sehingga setiap jenis kendaraan bermotor akan dikenakan keringanan BBNKB berbeda-beda, tergantung dari Peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nilai persentase keringanan BBNKB ini setiap Tahun tidak selalu sama, terkadang akan mengalami penurunan atau mengalami kenaikan.

Berdasarkan atas laporan tahunan kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selalu mengalami perubahan setelah adanya perubahan peraturan tentang

pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Perubahan Keputusan Gubernur/ Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sample Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Jawa Tengah khususnya pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah. Dari sisi otoritasnya, Kantor Dinas Pendapatan Daerah ini merupakan Kantor yang mengurus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah ini terdiri 46 Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD).

TABEL 3.1
Daftar UPPD se-Jawa Tengah

NO	UPPD	NO	UPPD
1	KOTA SEMARANG I	24	KAW. C E P U
2	KOTA SEMARANG II	25	KOTA PEKALONGAN
3	KOTA SEMARANG III	26	KAB. PEKALONGAN
4	KOTA SALATIGA	27	KAB. B A T A N G
5	KAB. SEMARANG	28	KAB. PEMALANG
6	KAB. K E N D A L	29	KOTA T E G A L
7	KAB. D E M A K	30	KAB. T E G A L
8	KAB. GROBOGAN	31	KAB. B R E B E S
9	KOTA SURAKARTA	32	KAW. BUMIAYU
10	KAB. SUKOHARJO	33	KAW. TANJUNG
11	KAB. K L A T E N	34	KAB. BANYUMAS
12	KAW. PRAMBANAN	35	KAW. WANGON
13	KAB. BOYOLALI	36	KAB. C I L A C A P
14	KAB. S R A G E N	37	KAW. MAJENANG
15	KAB. KARANGANYAR	38	KAB. PURBALINGGA
16	KAB. WONOGIRI	39	KAB. BANJARNEGARA
17	KAW. PURWANTORO	40	KOTA MAGELANG

TABEL 3.1 (Lanjutan)

Daftar UPPD se-Jawa Tengah

NO	UPPD	NO	UPPD
18	KAW. BATURETNO	41	KAB. MAGELANG
19	KAB. P A T I	42	KAB. K E B U M E N
20	KAB. K U D U S	43	KAB. PURWOREJO
21	KAB. J E P A R A	44	KAW. B A G E L E N
22	KAB. R E M B A N G	45	KAB. TEMANGGUNG
23	KAB. B L O R A	46	KAB. WONOSOBO

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel adalah sesuatu yang dijadikan objek pengamatan penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel Dependen

Yang menjadi variable dependen dalam penelitian ini adalah *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* selama periode 2001 sampai 2005. Data pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan bulanan kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah. *Bea balik Nama Kendaraan Bermotor* merupakan pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan , atau pemasukan kedalam badan usaha. Data mengenai Laporan bulanan tentang pendapatan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor baru di Propinsi Jawa Tengah bisa dilihat pada lampiran 1 sampai dengan 5.

b. Variabel Independen

Dalam penelitian ini akan digunakan 3 (tiga) variable Independen yaitu:

1) Harga BBM (Bahan Bakar Minyak)

Harga BBM yang dimaksud adalah harga bahan bakar yang digunakan Kendaraan Bermotor untuk bermobilisasi. Pengukuran variabel ini dilihat dari persentase kenaikan harga BBM yang dihitung dari perbandingan perubahan harga BBM sebelum dan sesudah mengalami kenaikan. Data mengenai perubahan harga BBM selama periode Tahun 2001-2005 disajikan pada lampiran 6.

2) Jumlah Kendaraan Bermotor

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di suatu daerah tergantung dari jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan nomor polisi daerah tersebut atau banyaknya kendaraan bermotor yang memakai nomor polisi daerah tersebut akan tetapi di gunakan di daerah lain atau di luar daerah dimana kendaraan tersebut di daftarkan pajaknya pada kantor SAMSAT asal nomor polisi kendaraan tersebut. Suatu daerah akan selalu mengusahakan agar kendaraan bermotor yang berada di daerah tersebut menggunakan nomor polisi daerah tersebut bukan nomor polisi luar daerah dimana kendaraan bermotor tersebut berada. Data mengenai jumlah kendaraan bermotor baru yang akan dilakukan penelitian tersaji pada lampiran 7 sampai dengan 11.

3) Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selalu didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah Tingkat I untuk menyusun Peraturan pelaksanaannya, yang sering disebut juga Peraturan Gubernur. Peraturan ini setiap tahun mengalami perubahan, tergantung kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri dalam menentukan kebijaksanaannya. Peraturan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan. Dalam peraturan ini yang dilakukan perubahan adalah pemberian keringanan Pajak Kendaraan bermotornya, tapi perubahan ini juga mempengaruhi Bea Balik nama Kendaraan bermotor, sebab masyarakat diberikan keringanan oleh negara dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga diharapkan masyarakat yang berdomisili di daerah tertentu dan Kendaraan Bermotornya masih berdomisili di luar daerah pemilik memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke dalam daerah pemilik untuk nantinya dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Keputusan Gubernur atau Peraturan Gubernur tentang pemberian keringanan pembayaran BBNKB ini muncul di sebabkan oleh keluarnya Keputusan Menteri

Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang di dalamnya berisi tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Misalnya pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 dalam pasal yang ada menjelaskan bahwa Gubernur dapat memberikan keringanan pengenaan PKB dan BBNKB sesuai dengan kondisi daerah. Sehingga jika Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dirasa membebani Wajib Pajak, maka setiap Gubernur dapat mengeluarkan Keputusan Gubernur atau Peraturan Gubernur tentang pemberian keringanan pembayaran BBNKB. Hal ini dapat dilakukan oleh setiap Gubernur dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005 adalah :

- I. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 973/105 Tahun 2000 yang berlaku tanggal 3 Februari tahun 2000, memberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga kewajibannya ditetapkan sebesar :
 - a. Kendaraan Angkutan Umum..... 100%
 - b. Sepeda Motor..... 100%

c. Kendaraan Bermotor Lainnya.....100%

II. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 6 Tahun 2001 yang berlaku tanggal 12 April 2001, memberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga kewajibannya ditetapkan sebesar:

a. Kendaraan Angkutan Umum..... 50%

b. Sepeda Motor.....70%

c. Kendaraan Bermotor Lainnya.....80%

III. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No Tahun 2002 yang berlaku tanggal 20 Agustus 2002, memberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga kewajibannya ditetapkan sebesar :

a. Kendaraan Angkutan Umum..... 70%

b. Sepeda Motor.....75%

c. Kendaraan Bermotor Lainnya.....80%

IV. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 96 Tahun 2003 yang berlaku tanggal 12 September 2003, memberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga kewajibannya ditetapkan sebesar :

- a. Sedan, Sedan Station.....100%
- b. Kendaraan Bermotor Umum.....75%
- c. Sepeda Motor.....85%
- d. Kendaraan Bermotor Lainnya.....90%

V. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 25 Tahun 2004 yang berlaku tanggal 22 April 2004, memberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga kewajibannya ditetapkan sebesar :

- a. Sedan, Sedan Station.....100%
- b. Kendaraan Bermotor Umum.....75%
- c. Sepeda Motor.....90%
- d. Kendaraan Bermotor Lainnya.....90%

VI. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 33 Tahun 2005 yang berlaku tanggal 19 Mei 2005, memberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga kewajibannya ditetapkan sebesar :

- a. Sedan, Sedan Station.....100%
- b. Kendaraan Bermotor Umum.....85%
- c. Sepeda Motor.....90%
- d. Kendaraan Bermotor Lainnya.....90%

Dalam Keputusan Gubernur atau Peraturan Gubernur diatas menerangkan tentang besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat penyerahan pertama, kedua dan penyerahan selanjutnya. Jadi peraturan ini tidak hanya dikhususkan untuk kendaraan baru saja. Sedangkan nilai persentase diartikan bahwa setiap Wajib Pajak akan melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor, baik itu kendaraan bermotor baru maupun bekas akan dikenakan pajak sebesar persentase yang terdapat dalam Keputusan Gubernur atau Peraturan Gubernur tersebut. Jika terdapat perbedaan besar persentase pada setiap jenis kendaraan bermotor, berarti Wajib Pajak memperoleh keringanan dari pemerintah. Misalnya jika sepeda motor pada Tahun 2000 dikenakan BBNKB sebesar 100% sedangkan Tahun 2001 dikenakan BBNKB sebesar 70%, hal ini berarti pada Tahun 2001 Wajib Pajak kendaraan bermotor mendapat keringanan BBNKB sebesar 30% dan sebaliknya. Hal ini juga berlaku pada jenis kendaraan bermotor yang lainnya.

Keputusan Gubernur atau Peraturan Gubernur tentang pemberian keringanan pembayaran BBNKB dikeluarkan akibat dari penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor oleh Menteri Dalam Negeri di rasa membebani Wajib Pajak. Secara logika, jika Nilai Jual Kendaraan Bermotor naik, maka keringanan pembayaran BBNKB yang diberikan oleh pemerintah akan semakin banyak, sehingga masyarakat akan terdorong untuk membeli kendaraan bermotor yang kemudian menyebabkan pendapatan BBNKB meningkat. Peningkatan ini disebabkan Wajib Pajak tidak lagi terbebani oleh BBNKB yang tinggi dengan adanya keringanan pembayaran BBNKB yang diberikan oleh pemerintah.

3.3. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan bulanan Dinas Pendapatan Daerah. Laporan tersebut diperoleh dari Kantor Pusat Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang sedangkan data mengenai jumlah kendaraan bermotor juga diperoleh dari data yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah.

Untuk variabel harga BBM dilihat pada saat terjadi perubahan, sedangkan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tentang pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di lihat perubahannya setiap setahun sekali dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya peraturan pemerintah tersebut. Keringanan tersebut berlaku selama peraturan pemerintah belum mengalami perubahan lagi.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 46 Kantor UPPD dan dibatasi pada daerah yang mengeluarkan laporan keuangannya secara bulanan sejak Tahun 2001 sampai dengan laporan keuangan Tahun 2005.

Sampel yang digunakan terlebih dahulu diseleksi dengan tujuan agar diperoleh sampel yang representatif. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut :

- 1) Seluruh kantor UPPD yang ada di Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- 2) Laporan keuangan Dinas Pendapatan daerah yang akan diteliti bersifat bulanan.

3.5. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah :

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi dalam penelitian ini ditemukan gejala-gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, normalitas dan linearitas. Juga untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual pada model penelitian ini berdistribusi normal atau tidak.

a. Multikolinearitas

Menurut Nachrowi (2006), Multikolinearitas adalah hubungan linier antar variabel bebas. Artinya setiap perubahan satu variabel bebas (independent) akan mempengaruhi variabel bebas yang lainnya dalam satu model regresi. Padahal, variabel bebas yang baik adalah variabel bebas yang mempunyai hubungan dengan variabel terikat (dependen), bukan dengan sesama variabel bebas.

b. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah tidak konstannya atau berubah-ubahnya varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau dengan kata lain Heterokedastisitas adalah suatu keadaan bahwa salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi bersifat BLUE maka $var(\mu_i)$ harus sama dengan σ^2 (*konstan*), atau dengan kata lain, semua residual atau error mempunyai varian yang sama.

c. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu

observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series).

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah menggunakan **Uji Durbin – Watson**.

Uji Durbin – Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen.

2. Regresi Berganda

Regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kenaikan harga BBM, perubahan Peraturan Pemerintah Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan jumlah kendaraan bermotor. Model dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana ;

Y = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

X₁ = Kenaikan Harga BBM

X₂ = Jumlah Kendaraan Bermotor

X₃ = Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur
Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

e = Variabel pengganggu

3. Pengujian Hipotesis

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dimana uji ini dilakukan untuk menguji kesesuaian teori dengan hasil regresi, yang didasarkan pada koefisien regresi dengan masing-masing independent variable.

a) Hipotesis pengaruh factor (X_1 , X_2 , X_3) secara bersama-sama terhadap

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu:

H_0 : Tidak ada pengaruh yang significant antara variable-variabel *kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor dan Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* terhadap *Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.

H_a : Ada pengaruh yang significant antara variable-variabel *kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor dan Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji F digunakan untuk menguji significant koefisien regresi secara bersama-sama. Uji F menunjukkan pengaruh semua variabel bebas secara serempak atau bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Uji F dilakukan dalam 3 tahap, yaitu sebagai berikut:

1) Merumuskan hipotesis

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

Artinya secara serempak atau bersama-sama tidak ada pengaruh variabel bebas X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap variabel tidak bebas Y .

$H_a: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$ atau sekurang-kurangnya terdapat satu koefisien regresi yang $\neq 0$

Artinya secara serempak ada pengaruh variabel bebas X_1 , X_2 , dan X_3 yang signifikan terhadap variabel tidak bebas Y .

2) Menentukan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan, misalnya $\alpha=5\%$ dan derajat kebebasan $df = (n-k) + (k-1)$, $V_1=n-1$, $V_2=n-k$, digunakan untuk mencari nilai F_{kritis} dari Tabel F.

Uji F dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nilai F_{hitung} dibandingkan dengan nilai F_{tabel} ($df = (n-k) + (k-1)$, $V_1=n-1$, $V_2=n-k$, $\alpha=5\%$).

- 1) Bila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka $H_0 = diterima$ dan $H_a = ditolak$, artinya secara serempak semua variabel bebas X_1 , X_2 , dan X_3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas.

2) Sebaliknya jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka $H_0 = ditolak$ dan $H_a = diterima$, artinya secara serempak semua variabel bebas X_1 , X_2 , dan X_3 berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas.

b) Hipotesis pengaruh secara parsial dari masing-masing factor yang diteliti terhadap *Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* adalah sebagai berikut:

Ha2 : *Kenaikan harga BBM* berpengaruh significant secara negatif terhadap *Pendapatan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor*.

Ha3 : *Jumlah kendaraan bermotor* berpengaruh signifikan secara positif terhadap *Pendapatan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor*.

Ha4 : *Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* berpengaruh significant secara negatif terhadap *Pendapatan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor*.

Untuk melakukan pengujian hipotesis tersebut diatas apakah semua variabel yaitu *kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor dan Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* berpengaruh secara parsial terhadap *Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* maka

pengujian yang dilakukan adalah *uji t*. *Uji t* digunakan untuk menguji significant koefisien regresi secara parsial atau pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel tidak bebas. Pengaruh variabel bebas secara individual dan signifikan terhadap variabel bebas. *Uji t* dilakukan melalui tiga (3) tahap, yaitu:

1) Merumuskan hipotesis

$$H_0: b_i = 0$$

Artinya Tidak ada pengaruh variabel bebas X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap variabel tidak bebas Y .

$$H_a: b_i \neq 0$$

Artinya ada pengaruh variabel bebas X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap variabel tidak bebas Y .

2) Menentukan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan, misalnya $\alpha = 5\%$ dan $df = n - k$, digunakan untuk mencari nilai t kritis dari t table.

Uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam pengujian hipotesis mengenai hubungan variabel bebas secara individual

terhadap variabel tidak bebas, nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t table.

- 1) Bila nilai t hitung lebih besar dari nilai t -tabel ($df = n - k$, $\alpha = 5\%$), maka $H_0: b_1 = 0$ ditolak dan $H_a: b_1 \neq 0$ diterima, artinya secara

individual variabel bebas X_1 , X_2 , dan X_3 berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas.

- 2) Sebaliknya bila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka $H_0: b_1=0$ *diterima* dan $H_a: b_1 \neq 0$ *ditolak*, artinya secara individual masing-masing variabel bebas X_1 , X_2 , dan X_3 tidak berpengaruh secara signifikan.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan pengujian pengaruh *Kenaikan Harga BBM, Jumlah Kendaraan Bermotor, dan Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* terhadap *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* sebagai variable dependen (variable terikat).

4.1 Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif untuk semua variabel baik variabel independen yaitu *Kenaikan Harga BBM, Jumlah Kendaraan Bermotor, dan Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*, maupun variabel dependen yaitu *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Deskriptif statistic

	BBNKB	Harga BBM	Jumlah Kendaraan Bermotor	Peraturan Gubernur
Mean	49.866.637.954	0,028201511	35.703,5	0,119845
Median	47832707003	0	33.651,5	0,0625
Standard Deviation	15797242896	0,124190998	11104,72701	0,132742159
Kurtosis	-0,991659056	38,2563386	-0,899015551	-0,956995713
Skewness	0,39708701	5,906285358	0,361097417	0,93492114
Minimum	24.411.153.490	-0,025936599	19.197	0
Maximum	82.862.478.600	0,875	60.991	0,3333
Count	60	60	60	60

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari table 4.1 dapat dilihat bahwa *kenaikan harga BBM* memiliki nilai maksimum sebesar 0.875; nilai minimum -0.025936599 dan nilai rata-ratanya 0.028201511. Sedangkan *Jumlah Kendaraan Bermotor* yang memiliki nilai maksimum 60.991; nilai minimum 19.197 dan nilai rata-ratanya 35.703,5. Begitu pula dengan *Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah* yang memiliki nilai maksimum 0.3333; nilai minimum 0 dan nilai rata-ratanya 0.119845. Artinya penyebaran data *Harga BBM, Jumlah Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah* mengelompok di sekitar nilai rata-ratanya. Yang menunjukkan bahwa nilai sebaran data *Harga BBM, Jumlah Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah* bagus.

Nilai *kurtosis* menunjukkan tingkat kelancipan atau homogenitas distribusi data. Semakin besar nilai *kurtosis* berarti data tersebut bersifat homogen. Sedangkan nilai *skewness* (kemencengan) yang menunjukkan kemiringan atau kemencengan distribusi data. Semakin kecil nilai *skewness* atau mendekati nol (0), maka data

normal atau tidak miring. Nilai *skewness* bersama nilai *kurtosis* digunakan untuk mengetahui tingkat normalitas data. Dari table 4.1 diatas nilai *kurtosis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* sebesar -0,991659056; dan nilai *skewness* 0,39708701. Berarti data *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* termasuk dalam jenis distribusi datar atau *platikurtis* yang memiliki nilai *kurtosis* < 3 . Hal ini menunjukkan bahwa data *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* tidak menyebar atau bersifat homogen dan terdistribusi normal.

Nilai *skewness Harga BBM, Jumlah Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah* secara berturut-turut adalah 5,906285358, 0,361097417, dan 0,93492114. Berarti bahwa data tersebut normal atau tidak miring.

Sama halnya dengan nilai maksimum, nilai minimum dan nilai rata-rata, standard deviasi juga menunjukkan tingkat penyebaran data. Semakin kecil nilai standard deviasinya, maka datanya semakin baik, begitu pula sebaliknya. Besar standard deviasi *Harga BBM, Jumlah Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah* secara berturut-turut adalah 0,124190998, 11104,72701, dan 0,132742159.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji ini berkaitan dengan ada tidaknya multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas dalam model regresi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik tersebut agar hasil kesimpulannya tidak menimbulkan nilai bias.

4.2.1 Uji Multikolinieritas

Menurut Nachrowi (2006), Multikolinearitas adalah hubungan linier antar variabel bebas. Artinya setiap perubahan satu variabel bebas (independent) akan mempengaruhi variabel bebas yang lainnya dalam satu model regresi. Padahal, variabel bebas yang baik adalah variabel bebas yang mempunyai hubungan dengan variabel terikat (dependen), bukan dengan sesama variabel bebas.

Menurut Ghozali (2005 : 91), multikolinearitas terjadi jika korelasi antar variabel independennya tinggi (di atas 0,9). Hasil uji multikolinearitas menggunakan program SPSS 12.0 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Hasil Pengujian Multikolineritas

	Kenaikan Harga BBM	Jumlah Kendaraan bermotor	Perubahan peraturan gubernur
Kenaikan Harga BBM	1		
Jumlah kendaraan bermotor	-0.0151256	1	
Perubahan peraturan gubernur	-0.0247888	-0.505425	1

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari hasil tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa korelasi antara variabel kenaikan harga BBM dengan variabel jumlah kendaraan bermotor adalah sebesar 0.0151256. Korelasi antara variabel kenaikan harga BBM dengan variabel perubahan peraturan gubernur adalah sebesar 0.0247888, dan korelasi antara variabel perubahan peraturan gubernur dengan variabel jumlah kendaraan bermotor adalah sebesar

0.505425. Dari ketiga variable independent tersebut di ketahui nilai korelasi antara ketiganya tidak ada yang melebihi 0.9, ini berarti korelasi antara ketiganya lemah sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinieritas.

4.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series).

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah menggunakan Uji Durbin – Watson. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi di dasarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Pengambilan keputusan autokorelasi

Jika	Keputusan
$0 < dw < dl$	ada autokorelasi positif
$dl \leq d \leq du$	tidak ada keputusan
$4 - dl < dw < 4$	ada korelasi positif
$4 - du \leq dw \leq 4 - dl$	tidak ada keputusan
$du < dw < 4 - du$	tidak ada autokorelasi

Sumber: Ghozali (2005)

Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan pada table berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,915 ^a	,837	,828	6548669535	1,845

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y

Sumber : data sekunder, diolah

Dengan melihat tabel Durbin Watson statistics pada tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 0,05$) dengan jumlah sample sebanyak 60 ($n = 60$) dan jumlah variabel independen sebanyak 3 ($k = 3$), diketahui nilai $dl = 1,480$ dan nilai $du = 1,689$. untuk memenuhi persyaratan agar tidak terjadi autokorelasi, nilai hasil uji Durbin – Watson harus berada di antara 1,689 dan 2,311 ($du < dw < 4 - du$). Dengan melihat tabel 4.4 di atas, diketahui nilai Durbin – Watson yaitu 1,845. nilai ini berada di antara 1,689 dan 2,311, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

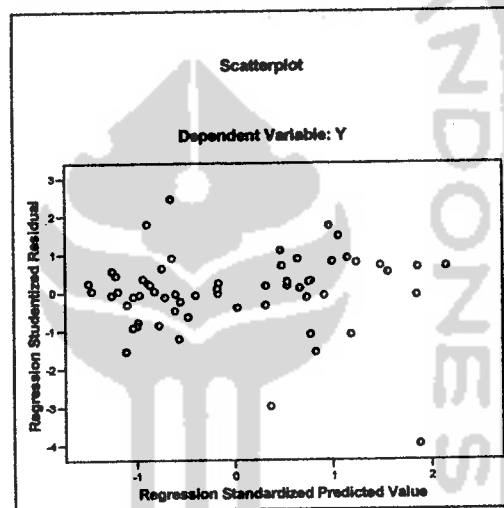
Heterokedastisitas adalah tidak konstannya atau berubah-ubahnya varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau dengan kata lain Heterokedastisitas adalah suatu keadaan bahwa salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi bersifat BLUE maka $var(\mu_i)$

harus sama dengan σ^2 (*konstan*), atau dengan kata lain, semua residual atau error mempunyai varian yang sama.

Mendeteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik sebagai berikut :

Gambar 4.1

Grafik scatterplot



Sumber : data sekunder, diolah

Kriteria tidak terjadinya heteroskedastisitas adalah titik-titik yang ada pada scatterplot menyebar secara acak (tidak membentuk suatu pola tertentu) di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari gambar tersebut diketahui bahwa kriteria tidak terjadinya heteroskedastisitas telah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

4.3 Analisis Regresi Berganda

Setelah dilakukannya pengujian asumsi klasik, maka dapat dilanjutkan pada penelitian analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel independent (*Kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor, dan perubahan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah*) dengan variabel dependen (*Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*). Model regresi linear berganda yang digunakan adalah:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Koefisien Regresi Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13173280842,078	3817760776,755		3,451	,001
X1	34373434123,827	6870585081,193	,270	5,003	,000
X2	1079739,316	89021,896	,759	12,129	,000
X3	-23584616120,887	7448685528,276	-,198	-3,166	,002

Sumber : data sekunder, diolah

Pada tabel 4.5 pada kolom *coefficients* diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 13173280842,078 + 34373434123,827X_1 + 1079739,316X_2 - 23584616120,887X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

X1 = Kenaikan harga BBM

X2 = Jumlah kendaraan bermotor

X3 = Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah

Persamaan tersebut memiliki makna sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 13.173.280.842,078 berarti bahwa jika variabel kenaikan harga BBM, variabel jumlah kendaraan bermotor, dan variabel perubahan Peraturan Gubernur adalah 0, maka nilai BBNKB adalah Rp. 13.173.280.842,078.
- b. Koefisien variabel kenaikan harga BBM yaitu sebesar 34.373.434.123,827 mengandung makna bahwa setiap kenaikan 1% harga BBM akan mengakibatkan BBNKB meningkat sebesar Rp. 34.373.434.123,827.
- c. Koefisien variabel jumlah kendaraan bermotor sebesar 1.079.739,316 memiliki makna yaitu setiap kenaikan 1 buah kendaraan bermotor akan mengakibatkan BBNKB meningkat sebesar Rp. 1.079.739,316.
- d. Koefisien variabel perubahan Peraturan Gubernur sebesar - 23.584.616.120,887 memiliki makna yaitu setiap perubahan gubernur sebesar 1% akan mengakibatkan BBNKB menurun sebesar Rp.23.584.616.120,887.

Tabel 4.6

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.915(a)	.837	.828	6548669534,845

Sumber : data sekunder

Hasil regresi berganda tersebut dapat dilihat bahwa besar koefisien determinasi setelah adanya penyesuaian (*Adjusted R Square*) adalah 0.828 atau 82.8%. Artinya bahwa kemampuan variabel-variabel independent menjelaskan pengaruhnya terhadap *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* setelah adanya penyesuaian dengan derajat kebebasan 0.05 adalah sebesar 82.8 %. Sedangkan sisanya yaitu 17,2 % dijelaskan oleh hal-hal lain diluar penelitian ini. Jadi dapat dikatakan bahwa model yang dibangun ini adalah bagus.

4.3.1. Hipotesis pengaruh secara bersama-sama dari faktor-faktor yang diteliti terhadap *Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* yaitu:

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apakah kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor dan perubahan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tentang pengenaan dasar tarif *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* mempunyai pengaruh terhadap *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.

Pengujian koefisien regresi untuk variabel ini adalah :

Ho1: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$; Kenaikan Harga BBM, jumlah kendaraan bermotor dan perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tentang pemberian keringanan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Bea Balik nama Kendaraan Bermotor.

Ha1: $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$; Kenaikan Harga BBM, jumlah kendaraan bermotor dan perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tentang pemberian keringanan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Bea Balik nama Kendaraan Bermotor.

Tabel 4.7

Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	123220560 345370300 00000,000	3	41073520115 12345000000, 000	95,776	,000(a)
	Residual	240156406 988978100 0000,000		42885072676 603240000,00 0		
	Total	147236201 044268100 00000,000				

Dari hasil regresi di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 95,776. Dari table distribusi t dengan $\alpha = 0.05$ dan degree of freedom (df) = 56 diperoleh nilai F table sebesar 2,7694. dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabelnya dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari F table ($95,776 > 2,7694$). Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa H_{04} ditolak. Atau dengan kata lain Kenaikan Harga BBM, jumlah kendaraan bermotor dan perubahan Keputusan gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tentang pemberian keringanan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Bea Balik nama Kendaraan Bermotor.

4.3.2. Hipotesis pengaruh secara parsial dari masing-masing factor yang diteliti terhadap *Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*

Hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t. H_0 ditolak apabila memenuhi syarat $T_{hitung} > T_{tabel}$. Berikut ini diuraikan pengujian hipotesis faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini :

4.3.2.1 Kenaikan Harga BBM

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apakah Kenaikan Harga BBM mempunyai pengaruh terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pengujian koefisien regresi untuk variabel ini adalah :

$H_{02} : b_1 = 0$; Kenaikan Harga BBM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Bea Balik nama Kendaraan Bermotor

$H_{a2} : b_1 \neq 0$; Kenaikan Harga BBM berpengaruh secara signifikan terhadap Bea Balik nama Kendaraan Bermotor

Dari hasil regresi di atas diperoleh nilai T hitung Kenaikan Harga BBM sebesar 5,003. Dari table distribusi t dengan $\alpha = 0.05$ dan degree of freedom (df) = 56

diperoleh nilai T table sebesar 1,6725. dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabelnya dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari T table ($5,003 > 1,6725$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak. Atau dengan kata lain ada pengaruh yang significant antara variabel *kenaikan harga BBM* terhadap *Pendapatan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor*.

Sedangkan jika dilihat dari nilai koefisiennya bahwa koefisien *kenaikan harga BBM* positif menunjukkan bahwa semakin tinggi *harga BBM* semakin tinggi pemakaian kendaraan bermotor terutama kendaraan roda 2, sehingga penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga akan semakin tinggi khususnya dari kendaraan roda 2.

4.3.2.2 Perubahan Jumlah Kendaraan Bermotor.

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apakah Jumlah Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pengujian koefisien regresi untuk variabel ini adalah :

$H_{03} : b_1 = 0$; Jumlah Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Bea Balik nama Kendaraan Bermotor

$H_{a3} : b_1 \neq 0$; Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Bea Balik nama Kendaraan Bermotor

Dari hasil regresi di atas diperoleh nilai T hitung Jumlah Kendaraan Bermotor sebesar 12,129. Dari table distribusi t dengan $\alpha = 0.05$ dan degree of freedom (df) = 56 diperoleh nilai T table sebesar 1,6725. dengan membandingkan nilai T hitung

dengan nilai T tabelnya dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari T table ($12,129 > 1,6725$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak. Atau dengan kata lain ada pengaruh yang significant antara variabel *Jumlah Kendaraan Bermotor* terhadap *Pendapatan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor*.

Sedangkan jika dilihat dari nilai koefisiennya bahwa koefisien *Jumlah Kendaraan Bermotor* positif menunjukkan bahwa semakin tinggi *Jumlah Kendaraan Bermotor* maka semakin tinggi juga pendapatan asli daerah di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

4.3.2.3 Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apakah Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pengujian koefisien regresi untuk variabel ini adalah :

$H_{04} : b_1 = 0$; Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi

Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap Bea Balik nama Kendaraan
Bermotor

$H_{a4} : b_1 \neq 0$; Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur
Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan
Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
berpengaruh secara signifikan terhadap Bea Balik nama
Kendaraan Bermotor

Dari hasil regresi di atas diperoleh nilai T hitung Perubahan Keputusan
Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian
Keringanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 3,166. Dari
table distribusi t dengan $\alpha = 0.05$ dan degree of freedom (df) = 56 diperoleh nilai T
table sebesar 1,6725. dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabelnya
dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari T table ($3,166 > 1,6725$).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_{03} ditolak. Atau dengan kata lain ada
pengaruh yang significant antara variabel *Perubahan Keputusan Gubernur /
Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan
Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* terhadap *Pendapatan Bea Balik
nama Kendaraan Bermotor*.

Sedangkan jika dilihat dari nilai koefisiennya bahwa koefisien Perubahan
Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian
Keringanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor negatif menunjukkan
bahwa jika keringanan pembayaran *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* naik maka
pendapatan BBNKB akan turun. Hal ini dapat dilihat dalam data, contohnya data
BBNKB tahun 2003 dengan data BBNKB tahun 2004, keringanan pembayaran

BBNKB pada tahun 2003 lebih tinggi daripada keringanan pembayaran BBNKB tahun 2004 yang mengakibatkan pendapatan BBNKB tahun 2002 lebih rendah daripada pendapatan BBNKB tahun 2004. Pada perubahan peraturan gubernur ini tidak semua golongan kendaraan yang pemberian keringanan pembayaran BBNKB berubah, perubahan ini kadang-kadang hanya pada golongan kendaraan tertentu saja, sehingga kenaikan BBNKB tergantung dari golongan kendaraan mana yang mendapat keringanan BBNKB. Untuk golongan kendaraan yang lain tidak akan terpengaruh pendapatan BBNKBnya, karena tidak memperoleh keringanan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Analisis dalam penelitian ini dilakukan pada kenaikan harga BBM, jumlah kendaraan bermotor dan perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan harga BBM berpengaruh secara signifikan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari T table yang berarti kenaikan harga BBM akan memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah pendapatan daerah di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Karena jumlah kendaraan bermotor akan semakin bertambah dengan adanya kenaikan harga BBM khususnya kendaraan roda 2.
2. Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari T table yang berarti Jumlah kendaraan bermotor akan memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah

pendapatan daerah di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Karena semakin banyak kendaraan bermotor di daerah Propinsi Jawa Tengah yang menggunakan nomor polisi daerah Jawa Tengah akan semakin tinggi juga pendapatan asli daerah Propinsi Jawa Tengah di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari T table yang berarti Perubahan Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah pendapatan daerah di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Karena jika keringanan pembayaran *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* naik maka pendapatan BBNKB akan turun, tapi kadang-kadang perubahan ini hanya terjadi untuk golongan kendaraan tertentu saja, sehingga perubahan ini akan menyebabkan BBNKB yang diperoleh tidak akan terlalu banyak mengalami perubahan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, wilayah yang di masukkan dalam penelitian hanya mencakup wilayah Propinsi Jawa Tengah sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini belum bisa maksimal, karena Propinsi Jawa Tengah belum dapat mewakili wilayah Negara Republik Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini hanya mengambil tiga faktor saja yang mempengaruhi pendapatan BBNKB, karena sebenarnya masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pendapatan BBNKB, tapi tidak dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor tersebut karena sulitnya mencari data. Kemudian dalam penelitian ini hanya meneliti tentang kendaraan baru saja sedangkan kendaraan lama tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dan juga penelitian ini tidak memisahkan jenis-jenis kendaraan tapi secara keseluruhan jenis kendaraan, sedangkan jika dilihat secara kenyataan bahwa terkadang hanya kendaraan jenis tertentu saja yang mengalami peningkatan, baik jumlah maupun dari segi penerimaan pendapatan BBNKB. Dari beberapa kekurangan yang ada dalam penelitian ini mengakibatkan penelitian ini belum mampu memberikan hasil yang maksimal.

5.3. Saran

1. Setelah meneliti dan menyimpulkan hasil penelitian dari tugas akhir atau skripsi tersebut, Penulis menyarankan kepada pemerintah agar dalam membuat keputusan tentang pajak daerah maupun retribusi daerah bisa lebih dipertimbangkan segalanya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya pendapatan asli

daerah yang diperoleh bisa lebih dimaksimalkan. Pendapatan asli daerah akan maksimal atau meningkat jika masyarakat tidak dibebani dengan berbagai macam peraturan yang dibuat pemerintah.

2. Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian di masa datang, wilayah yang akan diteliti akan lebih baik jika mengambil wilayah Negara Republik Indonesia secara keseluruhan, sebab nantinya akan terlihat secara jelas bagaimana pengaruh dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah di sektor bea balik nama kendaraan bermotor. Dan juga akan lebih baik lagi jika mahasiswa yang akan melakukan penelitian di masa datang bisa menambah jumlah variabel independent agar nantinya hasil yang di peroleh dari penelitian selanjutnya bias lebih maksimal. Dan juga dapat menambah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan BBNKB selain ketiga faktor yang ada di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali Imam, (2005), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS 12*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Nachrowi & Hardius Usman, (2006), *Pendekatan Praktis dan Populer Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. S.E., (2006), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kesit Bambang Prakosa, (2003), *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Susilo, Y.Sri, (2002), *Dampak Kenaikan Harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) terhadap Kinerja Ekonomi Makro*, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001, Tentang Pajak Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2002, Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berikut Petunjuk Pelaksanaanya. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 96 Tahun 2003, Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003. Semarang.

**Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 25 Tahun 2004, Tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2004. Semarang.**

**Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 33 Tahun 2005, Tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2005. Semarang.**

**Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 5 Tahun 2006, Tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2006. Semarang.**

**Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2001
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor**

**Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor**

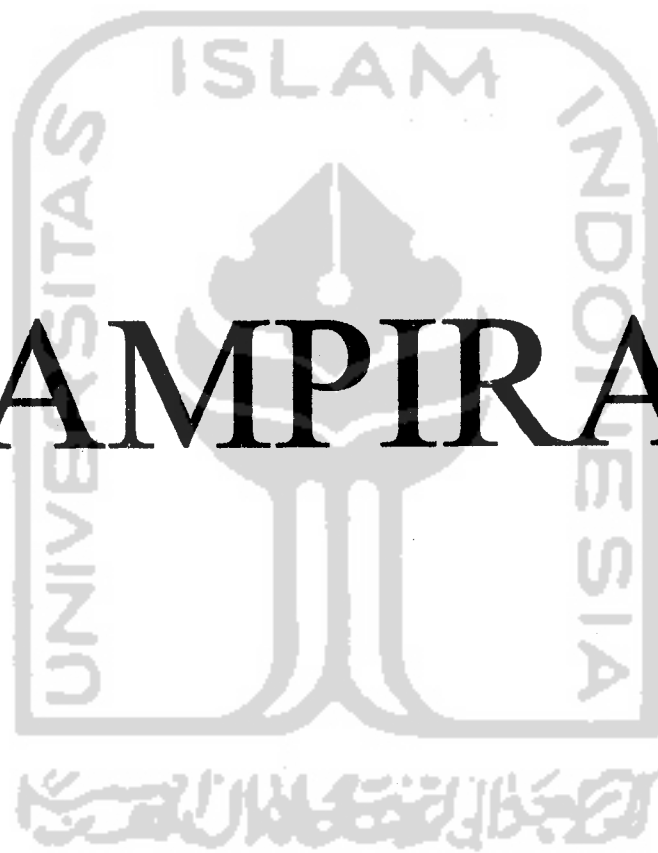
**Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor**

**Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar
Penaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1
RINGKASAN PENERIMAAN BBN-KB I KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2001
(dalam Rp)

NO.	KANTOR	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	JUN I	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	CABANG/KPP/DRASBAT	3.159.006.400	3.967.599.100	3.886.516.450	4.112.390.875	3.911.347.300	4.072.937.850	4.451.958.650	3.399.424.725	3.498.703.350	3.782.683.950	3.441.997.700	2.957.216.700
2	KOT. SMO. WIL. GENUK	1.639.680.700	1.988.420.350	2.093.283.475	1.787.632.100	1.674.357.400	2.192.074.050	2.293.815.100	1.802.404.850	2.119.096.450	2.172.600.300	2.092.284.375	1.893.884.250
3	KOT. SMO. WIL. BYMNK	1.091.033.250	1.454.111.000	1.567.897.350	1.352.036.225	1.431.680.400	1.228.396.300	1.578.550.350	1.244.090.475	1.523.703.150	1.458.783.200	1.356.497.900	1.148.615.500
4	KAB. KENDAL	823.364.000	806.024.200	639.472.000	832.081.750	723.982.000	839.130.750	930.625.000	1.012.827.300	1.270.395.750	1.377.741.000	1.390.301.000	1.104.630.300
5	KAB. DEMAK	617.230.000	618.024.050	636.169.750	612.986.350	643.502.000	623.844.100	764.715.500	718.810.800	809.415.000	918.063.000	956.362.500	571.342.500
6	KAB. GROBOGAN	468.887.000	626.352.000	614.982.500	588.074.000	576.729.500	581.357.400	672.917.600	642.857.600	800.452.500	850.475.000	838.380.800	649.210.400
7	KOT. SALATIGA	214.829.000	263.456.250	361.525.650	214.533.500	256.388.450	328.759.375	375.452.000	360.230.250	319.610.300	356.079.500	390.953.000	320.431.000
8	KAB. SEMARANG	651.522.000	673.816.000	761.301.500	578.942.000	821.587.500	722.822.500	971.950.000	816.157.500	741.294.250	1.099.189.000	1.066.016.750	789.015.000
9	KOT. SURAKARTA	1.442.363.500	1.922.533.200	2.432.099.650	2.334.934.600	2.142.837.250	2.463.064.275	1.843.400.750	2.307.996.500	2.057.409.600	2.291.309.300	2.138.147.000	1.499.897.400
10	KAB. SUKOHARJO	811.403.000	914.399.625	986.366.750	1.076.829.400	1.299.550.000	1.362.831.600	1.097.511.000	1.441.008.300	1.262.267.200	1.214.818.300	1.035.478.500	1.301.782.000
11	KAB. KARANGANYAR	370.677.250	670.370.250	704.019.000	746.212.000	697.477.250	866.704.000	794.895.500	905.604.750	973.631.000	1.102.338.000	1.035.478.500	879.419.000
12	KAB. WONOGIRI	370.677.250	670.370.250	704.019.000	746.212.000	697.477.250	866.704.000	794.895.500	905.604.750	973.631.000	1.102.338.000	1.035.478.500	879.419.000
13	KAW. PURWANTORO	53.678.000	64.403.000	41.849.000	47.810.950	483.697.900	457.917.600	475.161.000	480.607.500	607.336.250	687.244.600	568.065.000	526.155.000
14	KAB. KLATEN	1.039.309.375	1.041.091.300	1.131.943.375	1.161.405.250	1.091.621.250	1.164.437.000	1.025.848.750	1.232.182.300	1.486.348.500	1.478.091.100	1.541.216.200	1.130.994.500
15	KAB. BOYOLALI	441.726.575	579.215.000	489.082.250	569.504.500	568.663.000	566.780.000	726.954.500	856.226.000	856.226.000	1.007.641.000	848.886.000	556.548.000
16	KAB. SRAGEN	640.543.500	678.872.000	926.826.025	793.764.500	729.661.400	889.536.800	969.219.900	986.616.000	1.083.197.250	1.245.352.500	1.451.417.000	1.020.598.000
17	KOT. PEKALONGAN	454.086.400	680.327.775	541.315.000	587.500.300	521.575.225	562.717.500	491.809.600	567.099.400	528.502.400	731.472.400	605.288.600	496.032.200
18	KAB. PEKALONGAN	607.847.750	484.258.250	388.746.750	443.216.300	399.872.900	493.331.900	503.434.500	732.039.000	652.414.500	596.960.000	685.456.500	601.354.200
19	KAB. BATANG	328.502.000	291.383.200	267.409.500	266.122.000	307.524.000	411.299.800	366.176.000	683.688.000	615.032.900	485.757.500	441.116.000	365.737.600
20	KAB. PEMALANG	389.056.800	540.983.000	578.483.000	481.069.750	500.504.250	584.510.500	573.559.650	689.688.000	442.003.400	669.212.600	387.537.500	354.560.000
21	KOT. TEGAL	322.781.000	565.315.250	433.363.300	447.269.100	394.333.200	462.503.500	761.250.000	474.878.000	442.003.400	669.212.600	387.537.500	354.560.000
22	KAB. TEGAL	591.275.500	744.988.200	673.306.000	670.041.200	707.314.750	735.308.000	748.292.500	946.580.200	841.455.000	920.978.000	983.062.750	662.601.500
23	KAB. BRESES	428.026.000	447.680.600	584.241.000	498.462.700	471.299.000	659.421.500	403.034.900	386.103.500	322.405.000	425.677.000	375.957.000	210.325.000
24	KAW. BUMAYU	90.100.000	91.952.500	127.040.750	121.163.750	101.705.000	148.989.400	142.404.000	176.515.000	218.302.000	217.272.400	223.546.250	123.870.000
25	KAW. LOSARI	0	0	0	0	0	0	300.420.000	387.245.000	356.158.500	375.882.000	410.795.000	211.148.000
26	KOT. MAGELANG	265.476.000	329.975.500	536.836.325	370.627.250	322.303.500	398.765.000	490.537.450	468.901.650	360.351.250	343.139.000	439.532.500	307.150.000
27	KAB. MAGELANG	802.564.500	509.185.200	650.685.000	470.913.000	546.463.750	733.852.000	704.902.000	773.751.000	763.556.800	1.010.163.300	1.042.831.000	673.700.000
28	KAB. TEMANGGUNG	307.409.090	346.885.270	421.841.205	264.736.620	283.207.730	294.745.000	289.124.000	446.067.500	866.645.000	928.896.650	886.164.900	308.949.650
29	KAB. PURWOREJO	342.818.850	426.977.100	329.051.800	279.366.250	391.683.200	324.950.500	530.345.000	499.042.500	372.919.600	599.678.100	575.290.075	317.338.050
30	KAB. KEBUMEN	402.108.625	526.373.000	488.499.500	540.613.500	578.346.000	501.041.500	579.888.000	600.889.700	596.339.000	661.784.200	678.835.375	546.280.500
31	KAB. WONOSORO	227.272.500	233.488.000	266.949.000	304.615.550	260.028.325	250.465.000	332.970.800	331.037.500	422.150.000	507.087.000	521.702.900	325.564.000
32	KAB. P. A. T. I.	752.101.000	729.262.200	890.572.000	1.015.915.650	1.110.255.500	1.263.200.500	1.390.877.000	1.299.205.000	1.230.408.000	1.287.006.300	1.310.871.375	1.095.278.300
33	KAB. REMBANG	183.396.400	274.213.300	378.137.450	247.414.100	336.673.000	315.883.800	318.138.550	287.253.050	307.326.875	307.326.875	353.588.500	254.490.000
34	KAB. KUDUS	919.280.375	1.057.966.500	1.258.787.450	861.067.700	1.037.811.000	1.880.387.600	1.203.254.100	1.057.899.750	1.044.078.750	874.134.300	913.700.900	746.511.800
35	KAB. JEPARA	929.726.750	1.020.159.425	1.158.749.375	1.263.031.000	1.325.663.500	1.426.321.000	1.278.343.000	1.447.402.000	1.228.612.875	1.254.709.250	1.281.555.500	1.062.343.200
36	KAB. BLORA	200.553.700	194.579.000	269.591.000	299.757.350	219.925.000	236.143.000	181.405.000	256.624.000	237.293.000	218.275.000	297.345.000	158.458.000
37	KAW. C E P U	142.460.000	249.383.500	290.684.000	255.746.500	314.725.000	306.010.000	279.745.000	363.930.000	296.060.000	297.047.500	428.480.000	304.287.500
38	KAB. BANTUMAS	553.075.550	805.044.025	737.713.500	919.602.600	678.070.000	933.084.750	886.795.000	948.529.000	1.155.336.000	1.069.363.000	936.369.100	710.063.000
39	KAW. WANGON	158.409.000	229.741.500	269.640.500	236.070.000	242.118.000	272.102.000	272.102.000	260.700.000	345.363.400	338.722.900	331.405.000	285.940.000
40	KAB. PURBALINGGA	212.796.300	278.489.750	439.171.500	521.408.000	403.702.150	402.769.000	490.145.500	383.311.000	458.007.250	367.235.000	506.696.875	298.590.000
41	KAB. BANJARNEGARA	311.633.000	389.400.000	360.291.000	389.792.000	317.257.000	247.925.000	399.855.000	414.190.000	453.405.000	486.733.000	543.104.500	378.807.500
42	KAB. CILACAP	608.351.500	875.729.300	940.738.000	713.964.750	784.903.625	891.327.000	1.080.073.500	878.640.500	1.100.885.000	1.281.862.500	1.214.942.000	830.757.800
43	KAW. MAJENANG	141.730.000	196.831.000	175.830.000	244.127.875	228.833.000	258.017.500	297.910.000	415.083.000	317.173.750	311.235.000	272.683.000	235.225.000
	JUMLAH	24.411.153.490	29.203.888.270	30.839.524.555	30.023.386.395	29.987.642.205	33.491.946.150	34.078.003.400	34.211.974.700	35.460.620.125	38.993.517.725	38.290.083.725	29.151.316.400

LAMPIRAN 2
RINGKASAN PENERIMAAN BBN-KB I KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2002
(dalam Rp)

NO.	KANTOR CABANG/KP/DM/MBAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	KOT. SNG. WIL. GENUK	3.382.167.773	3.837.011.930	3.573.221.225	4.180.456.450	4.209.720.075	3.725.982.230	4.828.163.425	4.230.700.100	4.066.937.400	3.280.800.700	5.124.353.500	3.137.397.025
2	KOT. SNG. WIL. BYANIK	1.906.844.000	1.892.204.300	2.365.908.700	2.123.941.130	2.503.287.280	2.284.475.375	2.481.843.125	2.396.334.275	3.314.467.925	3.162.896.450	3.089.833.350	2.078.941.400
3	KOT. SNG. WIL. NGALAN	1.348.014.800	1.207.674.650	1.610.278.200	1.656.448.900	1.961.062.700	1.570.304.050	2.031.822.275	1.917.243.725	1.684.576.700	2.120.697.500	2.091.063.800	1.372.226.500
4	KAB. KENDAL	935.947.000	901.803.550	889.144.950	1.024.748.475	1.136.263.500	941.084.750	1.159.113.050	1.138.340.750	1.156.236.825	1.575.820.200	1.356.843.000	812.745.000
5	KAB. DEMAK	709.707.400	823.249.300	900.246.040	1.235.610.250	969.143.750	846.639.000	1.198.897.500	1.394.032.750	1.116.781.700	1.342.025.600	1.240.163.800	1.016.966.600
6	KAB. GROBOGAN	802.760.000	769.825.000	981.337.000	1.068.436.500	972.973.750	876.878.200	902.697.000	1.105.222.750	833.932.300	1.263.682.250	981.471.000	609.276.500
7	KOT. SALATIGA	253.378.000	356.645.525	294.996.350	380.560.425	434.853.850	497.737.500	386.984.800	332.356.000	439.318.900	370.240.300	480.212.000	362.610.000
8	KAB. SEMARANG	728.654.750	857.248.900	876.721.375	1.007.218.400	1.103.071.500	1.074.971.650	1.107.571.500	1.315.384.000	1.039.148.000	1.278.891.000	1.370.636.000	953.640.000
9	KOT. SURAKARTA	1.840.378.400	1.900.563.200	2.096.966.950	2.421.470.600	2.535.897.250	2.288.392.400	2.271.055.250	2.570.228.000	2.137.501.850	2.639.570.700	2.234.871.900	1.786.774.000
10	KAB. SUKOHARJO	1.253.522.000	1.156.688.750	1.194.413.500	1.479.326.000	1.246.703.000	1.371.497.200	1.620.240.800	1.614.139.000	1.434.170.000	1.713.830.000	2.137.712.000	1.266.733.000
11	KAB. KARANGANYAR	909.777.900	717.799.000	1.247.469.500	1.179.932.000	1.114.733.750	928.131.000	1.287.774.000	1.320.848.250	1.219.823.000	1.138.273.000	1.498.262.000	1.156.913.750
12	KAB. WONOGIRI	419.497.300	511.708.700	529.833.100	501.708.850	535.604.150	433.536.200	696.461.400	806.048.350	699.115.875	692.040.825	770.956.000	434.491.150
13	KAW. PURWANTORO	162.891.400	145.475.550	167.338.400	173.786.000	137.190.000	113.878.000	152.252.000	146.696.625	167.430.525	219.169.700	227.503.850	143.110.000
14	KAB. KLATEN	1.157.893.000	1.131.428.500	1.251.910.250	1.343.754.250	1.393.637.050	1.078.190.500	1.289.224.000	1.444.618.750	1.333.630.000	1.469.517.900	1.681.491.250	1.173.947.000
15	KAW. PRAMBANAN	200.672.500	208.958.000	224.625.000	229.673.500	188.408.000	672.593.700	972.082.500	1.113.323.000	1.084.315.000	1.097.891.000	1.267.713.000	867.172.000
16	KAB. BOYOLALI	673.632.750	1.020.305.000	1.244.339.700	1.311.797.675	1.441.238.375	1.135.116.125	1.308.972.925	1.497.386.225	1.313.928.175	1.397.673.500	1.350.602.000	1.163.047.250
17	KAB. SRAGEN	478.812.500	494.157.450	532.599.025	554.695.250	553.487.750	415.313.700	590.621.225	534.801.275	621.006.000	728.696.550	729.714.100	605.822.600
18	KOT. PEKALONGAN	762.873.400	492.281.025	529.573.150	479.373.000	527.328.000	428.960.100	566.436.625	808.323.350	510.831.000	774.740.000	734.730.000	827.850.000
19	KAB. PEKALONGAN	364.907.250	437.326.000	407.713.250	424.376.000	429.948.500	367.978.750	538.718.000	643.499.000	440.280.000	541.643.200	611.652.500	412.630.000
20	KAB. BATANG	710.382.000	544.938.000	581.682.000	587.101.000	644.185.000	636.210.000	741.847.425	734.027.625	704.920.000	861.414.000	829.200.000	550.144.000
21	KAB. PEMALANG	390.681.000	390.035.000	349.751.750	440.305.700	440.673.250	486.502.000	544.888.750	997.724.050	433.980.000	587.230.400	619.970.000	466.703.000
22	KOT. TEGAL	1.067.030.000	789.833.500	755.310.500	911.137.000	886.441.500	752.344.500	1.081.990.700	1.131.070.000	1.007.493.800	1.011.450.000	1.284.773.200	1.267.558.000
23	KAB. BREBES	353.357.000	349.113.000	282.535.000	270.664.000	327.983.000	287.678.750	417.385.000	396.000.000	416.510.000	444.790.000	490.041.350	330.750.500
24	KAB. BUMAYU	224.480.000	188.732.000	168.653.000	146.537.000	149.443.000	186.443.000	481.063.450	208.184.275	214.773.000	215.024.600	270.940.000	174.780.000
25	KAW. LOSARI	432.342.500	440.864.000	536.832.000	461.619.500	362.807.200	292.419.100	278.807.500	442.032.200	396.055.500	373.912.850	586.564.000	364.394.200
26	KOT. MAGELANG	790.074.200	734.201.900	714.517.000	1.002.274.500	818.113.400	754.090.000	1.043.402.500	884.433.600	774.703.000	998.030.000	1.142.826.500	793.744.500
27	KAB. MAGELANG	433.709.750	414.311.250	363.600.350	361.106.750	398.434.900	357.017.500	460.210.800	489.871.620	480.701.800	704.239.200	587.363.600	355.351.800
28	KAB. TEMANGGUNG	483.899.125	394.142.750	400.941.900	446.508.275	415.852.000	484.697.750	500.067.100	547.583.125	470.324.500	515.330.000	534.753.000	417.487.600
29	KAB. PURWOREJO	655.688.000	597.064.300	546.221.400	673.688.750	720.973.000	578.515.250	792.833.250	647.803.700	491.250.000	578.765.125	574.868.775	418.210.000
30	KAB. PURWOREJO	409.763.150	896.566.250	1.293.377.750	1.364.443.600	1.612.146.600	1.266.199.000	1.459.567.875	2.098.538.800	1.471.453.000	1.568.973.800	1.534.658.500	1.229.503.000
31	KAB. KEBUMEN	395.247.000	304.993.000	321.208.300	461.508.600	479.878.100	490.723.750	583.212.100	399.818.600	409.997.400	548.163.000	541.632.100	507.787.900
32	KAB. PATI	1.216.451.850	896.566.250	1.087.561.000	1.275.880.225	1.470.777.775	1.343.219.350	1.139.715.750	1.448.640.900	1.326.950.700	1.326.950.700	1.596.491.725	1.008.422.000
33	KAB. REMBANG	926.120.400	791.308.950	882.544.025	1.087.561.000	1.384.046.750	1.630.182.700	1.649.476.500	1.413.898.000	1.769.278.100	1.769.278.100	1.937.706.000	1.540.262.600
34	KAB. REMBANG	1.442.768.000	911.837.000	1.087.561.000	1.384.046.750	1.630.182.700	1.649.476.500	1.413.898.000	1.769.278.100	1.769.278.100	1.769.278.100	1.937.706.000	1.540.262.600
35	KAB. KUDUS	162.617.000	263.873.500	328.904.000	454.803.200	377.716.100	307.396.350	378.507.000	391.778.000	340.357.800	362.386.000	251.890.000	281.340.000
36	KAB. BLORA	162.617.000	263.873.500	328.904.000	454.803.200	377.716.100	307.396.350	378.507.000	391.778.000	340.357.800	362.386.000	251.890.000	281.340.000
37	KAB. BLORA	162.617.000	263.873.500	328.904.000	454.803.200	377.716.100	307.396.350	378.507.000	391.778.000	340.357.800	362.386.000	251.890.000	281.340.000
38	KAW. CEPU	846.015.200	983.547.950	894.268.500	1.142.376.800	1.221.004.000	1.073.281.000	1.240.999.275	1.291.433.500	1.046.568.000	1.378.680.500	1.389.569.450	1.050.873.000
39	KAB. BANTULMAS	213.623.000	246.291.000	294.126.425	275.071.750	332.620.000	346.338.000	410.052.000	405.673.250	302.712.000	413.000.000	438.530.000	285.120.000
40	KAW. WANGON	413.209.000	349.059.000	404.523.500	495.902.000	543.541.000	408.053.000	498.338.000	548.069.000	508.090.000	734.640.000	566.736.000	571.420.000
41	KAB. PURBALINGGA	413.209.000	349.059.000	404.523.500	495.902.000	543.541.000	408.053.000	498.338.000	548.069.000	508.090.000	734.640.000	566.736.000	571.420.000
42	KAB. BANJARNEGARA	413.209.000	349.059.000	404.523.500	495.902.000	543.541.000	408.053.000	498.338.000	548.069.000	508.090.000	734.640.000	566.736.000	571.420.000
43	KAB. CILACAP	849.370.000	776.367.000	1.543.520.600	1.224.144.100	1.214.528.000	1.118.667.300	1.221.552.800	1.673.437.500	1.052.676.300	1.300.222.950	1.542.324.000	1.084.925.000
44	KAW. MAJENANG	226.214.000	226.564.500	228.681.750	252.541.000	283.903.000	307.115.000	376.175.000	327.817.750	353.955.000	443.510.000	509.100.000	357.510.000
45	KAW. MAJENANG	32.859.583.500	31.371.377.400	33.213.125.125	38.650.879.000	40.545.120.100	35.424.018.475	43.153.364.700	46.330.639.670	40.393.352.275	47.947.131.035	49.142.821.175	35.780.458.575

LAMPIRAN 3
RINGKASAN PENERIMAAN BEN-KB I KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2003
(dalam Rp)

NO.	KANTOR	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	CABANG KANTOR	3.726.448.000	3.299.143.000	4.102.750.000	3.890.733.500	4.088.202.650	4.531.219.900	3.145.006.900	5.053.621.950	4.242.134.000	3.945.943.050	4.773.126.750	4.305.729.200
2	KOT. SMG. WIL. GENUK	2.581.512.250	2.471.643.375	2.664.108.800	2.742.598.100	2.633.408.100	3.089.606.800	3.090.591.775	3.443.176.000	3.512.377.775	4.196.777.375	3.444.304.300	3.335.912.850
3	KOT. SMG. WIL. BANYUWANG	1.924.946.300	1.690.183.000	2.698.013.600	2.246.733.350	1.869.399.000	2.216.772.400	2.348.855.800	2.097.420.600	2.447.076.550	2.721.125.300	2.900.300.000	2.211.255.400
4	KAB. DEMAK	393.490.000	310.897.000	426.910.000	339.936.800	426.822.500	338.435.000	445.880.000	491.375.750	486.990.000	491.100.000	489.163.400	486.082.000
5	KAB. KENDAL	1.265.010.000	939.893.000	1.036.169.000	1.003.834.400	1.045.217.500	1.239.031.000	1.231.397.650	1.200.441.000	1.481.277.500	1.769.750.000	1.390.990.000	2.004.548.500
6	KAB. GROBOGAN	867.079.000	676.842.000	732.318.000	994.917.200	732.610.000	984.650.000	1.033.772.500	1.133.435.500	962.570.000	1.415.480.200	1.040.141.800	1.197.503.000
7	KOT. SALATIGA	843.440.000	726.290.500	819.285.500	850.143.750	872.310.000	1.032.327.000	1.038.806.400	1.140.938.750	1.219.437.300	1.281.287.500	1.164.909.600	1.334.676.500
8	KOT. SURABAYA	2.234.849.400	2.090.218.500	2.801.991.000	2.732.760.000	2.133.964.250	2.480.621.750	2.610.341.250	2.845.382.500	2.927.857.250	3.321.702.000	2.649.332.800	2.885.242.500
9	KOT. SUKOHARJO	1.460.678.500	1.223.070.000	1.639.144.000	1.446.447.500	1.376.203.000	1.534.611.000	1.699.985.000	1.754.898.750	1.943.083.000	2.282.172.500	1.992.040.000	2.149.315.000
10	KAB. KARANGANYAR	1.224.397.500	1.023.688.750	1.142.397.250	1.236.927.825	1.284.052.150	1.417.369.400	1.657.465.000	1.818.492.500	1.698.896.250	1.876.131.250	1.696.707.500	2.053.000.000
11	KAB. WONOGIRI	216.732.500	186.320.000	215.833.000	202.270.000	199.548.500	238.330.000	274.452.000	281.665.000	308.992.500	324.482.500	284.130.000	378.145.000
12	KAB. WONOGIRI	813.840.000	651.135.000	710.239.000	860.277.000	825.993.500	1.288.850.900	1.531.677.300	1.663.882.500	1.493.180.000	1.774.544.500	1.438.227.400	1.961.497.500
13	KAB. PURWANTORO	1.076.966.250	1.169.660.000	1.119.513.625	1.335.491.000	1.072.111.200	1.244.320.000	1.252.087.000	1.251.560.000	1.265.300.000	1.348.095.000	1.238.340.000	1.582.602.500
14	KAB. KLATEN	427.456.500	463.979.000	533.394.000	468.471.000	434.170.000	547.327.200	682.816.400	720.745.600	744.105.575	780.431.075	825.602.300	994.529.025
15	KAB. PRAMBANAN	161.380.000	183.310.000	191.220.000	167.940.000	124.454.000	141.868.000	196.993.000	162.526.000	197.473.000	200.470.000	246.100.000	308.300.000
16	KOT. PEKALONGAN	988.097.500	884.747.000	981.982.000	1.387.650.000	1.219.917.250	1.545.862.000	1.268.190.000	1.362.489.400	1.132.810.000	1.240.087.500	1.621.621.000	1.964.886.900
17	KAB. PEKALONGAN	1.192.693.025	879.747.000	1.099.341.900	1.372.207.900	1.034.077.025	1.365.408.900	1.595.228.325	1.654.949.500	1.873.890.000	2.364.198.075	2.021.627.100	2.037.137.850
18	KAB. BATANG	1.575.147.600	1.180.669.500	1.354.000.000	1.707.920.600	1.724.254.600	2.077.490.000	1.773.291.400	1.772.732.000	1.742.565.300	2.257.527.500	1.941.482.700	2.448.928.600
19	KAB. PEMALANG	380.027.200	210.020.800	300.874.700	321.436.100	373.629.000	304.870.000	379.297.500	346.268.000	421.710.000	400.998.000	378.353.000	517.608.800
20	KOT. TEGAL	354.580.000	197.572.500	246.254.000	225.410.000	275.940.000	318.234.800	428.590.000	295.570.000	295.570.000	474.640.000	309.710.000	468.357.500
21	KAB. TEGAL	193.486.000	260.790.000	270.590.000	229.340.000	220.580.000	268.540.000	406.167.500	319.540.000	318.380.000	349.100.000	323.560.000	349.172.500
22	KAB. BREBES	604.945.200	579.688.350	436.397.800	408.518.800	509.317.950	451.677.900	899.403.750	677.728.200	786.012.050	1.019.773.800	793.476.700	735.064.000
23	KAB. LOSARI	1.046.701.000	411.853.600	362.033.800	344.138.800	442.524.600	528.770.000	635.097.500	706.170.000	1.081.812.000	1.053.637.500	1.053.195.750	1.437.870.000
24	KOT. MAGELANG	777.570.000	456.137.500	430.773.000	577.072.000	692.500.000	741.339.800	734.250.000	841.840.000	1.020.705.200	1.080.130.000	1.082.646.000	1.177.410.000
25	KAB. MAGELANG	896.330.000	515.320.000	725.781.000	403.485.000	708.920.000	755.165.000	574.320.000	735.977.500	1.053.830.000	746.476.000	719.503.000	807.670.000
26	KAB. TEMANGGUNG	506.830.500	409.790.000	278.758.000	345.320.000	412.563.000	1.094.839.000	1.119.903.000	1.153.949.500	1.478.530.000	1.633.886.800	1.654.537.200	1.791.637.500
27	KAB. PURWOREJO	229.170.000	139.220.000	140.920.000	203.910.000	173.810.000	241.286.000	1.056.970.000	293.950.000	329.270.000	729.890.000	590.196.000	613.960.000
28	KAB. KEBUMEN	527.034.400	390.579.600	433.426.800	368.395.250	378.774.500	369.606.000	553.330.000	531.349.200	603.657.400	496.463.600	637.518.800	577.257.100
29	KAB. WONOSOBO	1.239.121.500	1.029.164.000	1.296.950.600	993.097.300	1.312.718.100	1.590.841.800	1.413.972.000	1.694.615.200	1.694.615.200	1.698.615.200	1.340.866.600	1.586.680.000
30	KAB. PAKI	348.480.000	245.240.000	311.310.000	385.210.000	312.832.500	464.863.000	468.280.000	438.890.000	716.890.000	623.380.000	444.590.000	624.995.000
31	KAB. KUDUS	1.360.268.800	878.291.250	1.056.640.000	1.005.171.700	1.184.226.250	1.141.790.000	1.416.170.900	1.484.980.900	1.669.894.300	1.428.437.500	1.414.164.500	1.872.114.000
32	KAB. KUDUS	343.140.000	229.034.000	301.660.000	293.138.000	327.110.000	441.017.500	579.450.000	578.756.000	478.991.000	613.661.500	590.025.000	827.851.000
33	KAB. BLORA	577.960.000	357.020.000	569.460.000	570.405.000	674.822.000	850.240.000	750.830.000	750.830.000	738.258.000	840.140.000	776.370.000	901.500.010
34	KAB. BANYUWANG	433.656.000	309.010.000	667.433.000	440.929.000	601.773.350	445.802.300	694.923.050	460.268.400	993.914.750	496.450.000	738.305.000	534.325.000
35	KAB. BANYUWANG	867.890.000	685.780.000	811.909.500	920.184.000	919.823.000	742.114.400	643.620.000	561.817.000	467.430.000	843.120.000	582.234.000	626.281.100
36	KAB. PURBALINGGA	638.547.000	592.500.000	553.738.000	475.338.500	437.338.500	522.449.000	634.898.750	634.898.750	884.993.000	938.651.000	690.170.000	925.109.450
37	KAB. PURBALINGGA	361.473.590	287.278.500	434.350.400	299.187.900	254.577.200	420.671.000	526.656.000	484.493.800	747.632.500	877.033.500	752.235.300	522.895.600
38	KAB. CILACAP	300.426.500	306.168.000	288.498.000	310.714.500	326.336.500	326.336.500	326.336.500	326.336.500	326.336.500	326.336.500	326.336.500	326.336.500
39	KAB. MAJENANG	38.922.817.665	33.053.648.925	38.678.414.625	38.810.923.675	38.061.460.250	43.643.312.350	48.409.140.250	47.229.740.900	52.660.882.600	60.157.750.675	52.212.218.475	58.217.462.125

LAMPIRAN 4
RINGKASAN PENERIMAAN BBN-KBI KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2004
(dalam Rp)

NO.	KANTOR	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	KOT. SNG. WIL. GENDUK	4.071.185.800	4.977.880.000	5.932.892.790	6.395.011.800	6.325.532.800	9.106.731.875	7.028.315.175	5.120.951.475	5.533.276.300	6.677.053.475	5.463.393.100	5.829.921.530
2	KOT. SNG. WIL. BYANIK	2.810.640.450	3.305.900.200	4.103.097.450	3.985.104.750	3.905.947.000	4.484.294.450	3.789.900.500	3.907.113.500	3.538.104.500	4.071.206.500	3.738.824.400	4.564.227.475
3	KOT. SNG. WIL. NOLAN	2.504.929.400	2.476.773.000	3.107.030.150	3.054.957.800	2.677.171.200	3.235.752.000	2.838.091.875	2.730.160.200	3.039.092.450	3.039.092.450	2.969.868.575	2.969.868.575
4	KAB. KENDAL	604.372.500	612.850.000	604.992.800	659.358.750	532.022.500	727.098.000	611.372.500	786.179.750	827.420.000	782.310.000	775.930.000	806.420.000
5	KAB. DEMAK	1.598.333.000	1.293.177.000	1.672.477.500	1.778.186.500	1.542.848.750	1.795.733.000	1.914.925.000	1.901.924.000	2.173.970.000	2.481.020.000	1.752.690.000	2.481.999.500
6	KAB. GROBOGAN	1.014.999.400	927.460.000	1.150.043.800	1.284.466.700	1.164.103.000	1.472.283.300	1.417.370.000	1.367.780.000	1.429.073.600	2.160.357.300	1.623.820.000	1.665.480.000
7	KOT. SALATIGA	1.387.660.000	1.007.125.000	1.522.562.500	1.652.755.000	1.577.232.900	1.521.092.000	1.753.302.500	1.877.133.000	2.068.047.500	2.287.831.000	1.817.440.000	1.530.750.400
8	KAB. SEMARANG	1.238.315.000	963.865.000	1.297.610.000	1.323.137.500	1.388.432.000	1.583.698.000	1.583.698.000	1.667.876.200	1.665.456.250	1.909.668.500	1.523.344.500	1.530.750.400
9	KOT. SURABAYA	2.683.074.000	3.075.897.400	3.132.675.000	3.491.888.700	3.263.339.000	3.450.502.500	3.672.724.400	3.672.392.000	3.477.323.150	3.953.276.125	3.376.315.550	4.037.067.350
10	KAB. SUKOHARJO	2.109.401.000	1.555.748.750	2.060.994.300	2.058.819.300	1.700.025.000	2.707.427.500	2.287.257.000	2.479.641.000	2.106.998.000	2.987.055.000	2.259.760.000	2.263.790.000
11	KAB. KARANGANYAR	1.900.375.000	1.570.525.000	1.621.881.250	1.684.800.000	1.768.597.500	1.763.893.300	1.963.240.500	1.819.427.500	1.923.543.000	2.968.160.000	2.165.520.000	1.945.775.000
12	KAB. WONOGIRI	280.950.000	293.727.500	226.070.000	301.910.000	238.010.000	294.830.000	318.400.000	326.520.000	330.680.000	406.620.000	403.830.000	338.820.000
13	KAW. PURWANTORO	1.296.767.500	1.143.967.500	1.050.710.000	1.257.897.800	1.388.240.000	1.268.240.000	1.588.850.000	1.381.280.000	1.652.165.000	2.042.615.000	1.854.245.000	1.610.680.000
14	KAB. KLATEN	1.179.880.000	1.217.997.500	1.159.571.500	1.512.601.000	1.419.386.250	1.573.540.000	1.760.516.000	1.643.350.000	1.639.255.000	2.127.456.000	1.794.875.000	1.804.233.200
15	KAW. PRAMBANAN	1.823.733.000	1.431.673.000	1.725.470.600	1.771.442.800	1.821.305.000	2.149.372.000	1.878.203.000	1.664.915.000	1.972.452.500	2.316.863.500	1.781.678.000	2.029.033.000
16	KAB. BOYOLALI	824.726.950	695.866.075	795.866.700	778.473.000	681.688.000	779.560.000	854.383.000	764.570.000	839.400.000	975.741.250	833.104.000	825.267.500
17	KAB. SRAGEN	263.310.000	205.630.000	256.132.500	210.870.000	230.070.000	230.070.000	215.700.000	245.880.000	286.710.000	307.970.000	263.321.600	271.721.200
18	KOT. PEKALONGAN	1.570.238.800	1.325.930.000	1.645.768.000	1.765.894.400	1.685.406.600	1.980.630.800	2.072.460.350	1.970.930.500	2.493.182.250	2.816.044.050	2.323.880.000	2.159.308.000
19	KAB. PEKALONGAN	1.859.566.500	1.565.906.675	1.734.998.000	2.162.849.125	1.970.718.800	2.173.862.500	2.216.579.100	2.155.264.200	2.566.297.200	2.689.746.500	1.782.123.000	1.915.770.500
20	KAB. BATANG	1.725.977.700	1.547.286.400	2.130.012.600	2.138.605.000	2.322.493.100	2.243.080.500	2.412.154.000	2.566.534.800	2.566.534.800	2.981.737.750	2.730.998.700	2.843.342.500
21	KAB. PEMALANG	554.202.500	508.723.000	459.491.000	960.057.000	569.118.000	711.080.000	812.038.000	734.328.000	845.361.400	883.993.000	736.460.000	1.162.982.500
22	KOT. TEGAL	438.380.000	430.580.000	499.340.000	444.225.000	542.857.000	596.400.000	604.018.500	684.932.500	451.710.000	739.375.000	625.270.000	602.330.000
23	KAB. TEGAL	403.505.000	373.313.000	417.965.000	385.880.000	434.450.000	510.031.000	629.516.000	566.110.000	398.240.000	629.830.000	417.030.000	629.533.000
24	KAB. BREBES	752.860.200	653.037.200	824.498.950	977.833.900	732.578.600	881.178.500	874.678.200	781.181.825	933.270.000	1.021.640.100	981.842.500	1.394.390.000
25	KAW. BUMIYATU	1.017.127.000	651.032.250	677.693.300	754.332.800	619.337.200	771.507.200	918.520.000	834.050.000	933.270.000	1.218.334.000	957.569.000	953.300.200
26	KAB. BUMIYATU	677.764.000	456.270.000	541.314.000	845.785.000	627.560.000	844.260.000	874.492.000	823.213.000	984.770.000	1.368.075.000	1.008.092.500	1.471.295.000
27	KOT. MAGELANG	1.135.705.000	695.020.000	879.830.000	917.614.600	943.623.000	927.027.500	1.044.888.900	1.078.638.500	1.138.333.000	1.368.075.000	664.630.000	659.359.000
28	KAB. MAGELANG	1.012.957.500	687.110.000	1.241.672.000	1.223.952.000	1.410.995.500	1.243.425.500	1.464.290.000	1.459.070.000	1.672.694.000	2.035.337.000	1.559.121.600	2.017.753.400
29	KAB. TEMANGGUNG	1.020.439.500	1.410.103.500	1.241.672.000	1.223.952.000	1.410.995.500	1.243.425.500	1.464.290.000	1.459.070.000	1.672.694.000	2.035.337.000	1.559.121.600	2.017.753.400
30	KAB. PURWOREJO	593.732.500	412.297.500	570.309.625	516.904.000	510.812.000	693.540.000	600.936.000	538.430.000	664.077.500	795.845.000	564.100.000	714.895.000
31	KAB. KEBUMEN	399.945.000	292.840.000	417.475.000	261.713.000	278.332.500	305.330.000	332.150.000	332.000.000	408.460.000	488.720.000	443.150.000	494.170.000
32	KAB. WONOSOBO	478.377.200	503.946.800	497.462.400	495.525.000	537.070.000	596.320.000	688.682.300	641.040.000	744.660.000	1.005.346.500	1.001.157.450	956.609.450
33	KAB. P. A. T. I	1.703.419.000	1.551.936.800	1.853.567.800	1.863.748.000	1.554.031.500	1.751.133.650	1.580.667.500	1.530.224.500	1.421.189.100	1.878.568.100	1.388.434.200	2.128.472.600
34	KAB. REMBANG	570.820.000	493.210.000	554.862.800	387.722.500	447.777.500	541.193.500	533.482.500	568.167.500	451.569.000	684.250.000	444.010.000	813.820.000
35	KAB. KUDUS	1.601.737.500	1.084.912.500	1.707.367.500	1.518.038.500	1.197.315.500	1.755.976.000	1.386.839.000	1.387.946.000	2.080.797.000	1.687.040.000	1.992.735.000	1.992.735.000
36	KAB. JEPARA	567.008.500	615.405.000	710.405.000	570.380.000	646.992.500	671.996.500	671.996.500	599.120.000	753.214.000	948.240.000	617.587.000	937.723.050
37	KAB. BLORA	793.720.000	773.485.000	922.510.000	823.745.000	874.229.500	809.042.500	838.360.000	816.188.000	977.440.000	1.239.560.000	1.012.460.000	1.241.230.000
38	KAW. CEPU	692.250.000	642.890.000	826.850.000	853.447.500	664.970.000	952.820.000	924.020.000	1.000.700.000	913.520.000	1.139.785.000	807.180.000	981.850.000
39	KAB. BANTULAS	541.034.250	659.430.000	735.510.000	706.505.000	944.420.000	644.914.400	622.132.500	537.980.000	682.333.750	534.845.000	314.780.000	735.229.850
40	KAW. WANGON	1.291.363.000	1.389.080.000	1.333.697.500	1.292.665.000	1.285.310.000	1.329.165.000	1.389.165.000	1.286.940.000	1.305.957.500	1.950.831.000	1.664.615.000	1.486.857.250
41	KAB. PURBALINGGA	544.885.000	551.390.000	665.910.000	749.915.000	691.350.000	961.808.000	687.643.000	764.140.000	663.725.000	902.720.000	651.650.000	951.387.500
42	KAB. BANJARNEGARA	751.655.000	683.419.000	848.900.000	819.400.000	1.048.792.500	915.909.250	766.103.000	766.103.000	935.290.000	1.528.780.000	1.012.278.750	1.000.405.000
43	KAB. CILACAP	527.539.800	479.700.000	700.464.000	804.446.050	783.664.400	620.242.000	680.330.000	727.784.375	677.999.500	848.585.000	991.221.250	904.484.000
44	KAW. MAJENANG	384.385.000	431.790.000	479.083.000	549.865.000	576.140.000	506.251.250	567.774.100	567.774.100	620.020.000	733.910.000	705.600.000	607.130.000
JUMLAH		51.724.652.450	47.710.233.950	58.186.203.275	59.374.400.375	55.538.833.200	64.817.463.325	62.572.332.575	59.604.999.900	62.376.429.000	75.727.303.600	63.002.521.250	69.422.087.900

LAMPIRAN 5
RINGKASAN PENERIMAAN BRN-KB I KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2005
(dalam Rp)

NO.	KANTOR	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	JUN I	JUL I	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	CABANGKPP/PSAMBAT	5.561.163.600	6.133.744.650	8.141.872.400	7.817.328.400	7.894.883.850	7.707.331.175	6.283.257.900	8.084.534.200	7.132.826.000	6.530.338.800	4.960.234.750	3.639.713.550
2	KOTA SEMARANG I	3.968.475.900	4.765.963.725	5.683.536.750	5.335.443.425	5.757.349.300	5.064.395.250	4.375.807.150	4.066.288.250	4.467.091.750	5.111.271.050	3.030.433.250	2.682.182.500
3	KOTA SEMARANG II	3.337.935.900	3.972.220.250	4.175.262.475	4.001.023.500	3.984.300.950	4.112.645.925	3.784.616.400	3.352.832.300	3.676.093.650	3.360.345.000	2.045.707.200	2.530.366.850
4	KOTA SEMARANG III	1.012.909.000	1.004.309.000	1.004.309.000	1.004.309.000	1.004.309.000	1.015.740.750	869.317.700	897.187.700	991.310.950	772.161.500	303.120.750	608.008.000
5	KOTA SALATIGA	1.722.892.900	1.895.762.000	2.357.037.125	2.375.763.450	2.085.127.500	2.379.966.700	2.408.987.275	2.292.016.300	2.612.349.800	2.041.704.325	2.227.208.250	1.448.143.000
6	KAB. KENDAL	1.373.836.000	1.651.443.000	2.001.928.375	1.876.292.500	1.897.336.000	2.223.748.725	2.008.742.075	2.165.084.950	2.278.992.100	2.403.960.750	1.761.422.850	1.448.143.000
7	KAB. DEMAK	1.676.602.900	1.733.577.000	2.179.783.000	2.377.828.175	2.289.869.000	2.163.609.900	2.363.187.400	2.370.872.000	2.218.408.000	2.229.822.000	1.626.578.000	1.182.884.000
8	KAB. GROBOGAN	1.229.831.000	1.395.721.000	1.655.088.750	1.858.545.600	2.007.265.100	1.901.884.000	2.047.488.200	1.827.035.250	2.308.180.000	2.194.348.750	1.673.552.850	1.359.624.750
9	KOTA SURABAYA	3.633.245.900	3.755.303.000	4.318.773.000	4.298.043.625	4.030.740.500	4.205.007.200	4.367.835.625	4.364.724.750	4.077.851.250	3.907.432.375	2.136.386.250	2.550.750.750
10	KAB. SUKOHARJO	2.393.708.000	2.295.539.250	2.750.089.500	2.475.440.000	2.373.150.000	2.309.583.000	2.516.923.000	2.461.635.000	2.141.202.525	2.711.911.300	1.715.948.750	1.644.271.250
11	KAB. KLATEN	2.152.723.000	2.118.829.275	2.448.169.500	2.180.117.875	2.145.843.750	1.986.165.000	2.102.105.000	2.246.442.800	2.180.760.000	2.331.145.000	1.979.377.500	1.661.692.500
12	KAB. PRABALABANAN	316.463.000	364.635.000	398.142.250	307.708.500	388.873.500	374.675.000	360.375.000	347.085.000	479.107.500	420.250.000	343.600.000	332.275.000
13	KAB. BOYOLALI	1.634.972.500	1.504.049.500	1.887.759.500	1.694.469.500	1.661.404.750	1.595.024.150	1.527.312.500	1.629.248.750	1.645.987.750	1.894.705.000	1.777.224.500	957.067.050
14	KAB. SRAGEN	1.463.980.000	1.641.441.200	2.143.558.250	2.073.994.625	1.706.537.500	2.049.503.050	1.911.087.300	1.838.040.325	1.894.702.500	1.852.537.875	1.763.209.650	1.332.160.250
15	KAB. KARANGANYAR	1.925.350.500	1.995.020.000	2.427.973.000	2.241.866.500	1.892.889.250	1.909.341.175	2.036.063.000	1.997.184.625	1.954.260.625	2.258.133.750	1.633.195.250	1.452.455.500
16	KAB. WONOREJO	491.882.000	569.333.000	638.340.450	584.102.650	688.070.875	742.452.600	697.468.050	754.035.000	926.115.000	894.225.000	711.610.000	642.300.000
17	KAB. PURWANTORO	216.911.300	264.396.500	273.302.200	335.550.775	285.520.850	233.586.425	254.034.000	337.802.725	274.321.550	396.599.875	428.532.200	234.420.000
18	KAB. BATURAJA	194.439.000	181.756.000	146.741.000	187.490.375	132.110.500	122.888.000	128.130.000	193.150.000	174.115.000	240.955.000	193.162.500	149.935.000
19	KAB. PAJAJARAN	1.918.781.600	2.254.451.000	2.458.213.500	2.189.762.000	2.333.750.750	2.623.708.000	2.445.156.150	2.676.173.750	2.683.365.750	2.986.906.000	2.109.290.000	1.948.542.050
20	KAB. KUDUS	1.726.971.450	2.041.814.800	2.758.153.250	2.413.344.580	2.628.817.625	2.818.832.450	2.247.261.700	1.615.182.750	2.749.237.200	2.651.472.200	1.986.474.000	2.025.979.100
21	KAB. JEPARA	2.012.673.050	2.334.963.950	2.926.243.025	3.030.132.475	3.135.276.125	2.803.274.700	2.385.212.400	2.516.052.000	2.824.999.800	3.311.650.000	2.440.927.500	2.113.728.300
22	KAB. REMBANG	785.313.650	981.318.500	927.387.500	999.311.500	882.177.500	1.019.038.700	1.019.796.750	1.284.304.500	1.371.139.000	1.034.353.500	964.106.000	638.970.000
23	KAB. BLORA	514.269.500	677.004.500	793.571.500	776.381.500	773.444.000	672.741.750	838.487.500	915.071.500	900.630.000	1.023.632.500	661.512.500	538.597.500
24	KAB. CEPU	830.340.000	556.946.500	609.196.500	723.448.500	584.769.500	648.296.500	645.245.000	680.480.000	600.690.000	687.540.000	632.445.000	403.324.000
25	KOTA PEKALONGAN	746.231.500	712.646.275	882.263.500	1.174.716.125	791.446.075	818.602.100	1.162.846.325	942.263.300	1.160.744.475	1.048.106.350	742.575.150	804.589.200
26	KAB. PEKALONGAN	793.012.125	814.150.000	928.352.500	823.329.750	819.396.500	906.672.500	1.204.848.750	1.193.556.750	1.472.493.000	1.532.165.000	1.663.782.500	1.388.130.000
27	KAB. BATANG	918.479.800	734.031.602	1.119.986.725	1.091.071.500	949.982.500	1.006.701.250	1.056.685.000	1.284.219.500	1.830.618.500	1.931.274.350	1.296.342.750	1.002.433.500
28	KAB. PEMALANG	1.142.071.900	867.518.950	1.194.595.650	1.141.702.000	1.185.795.500	1.319.949.000	1.232.145.600	1.708.279.250	1.993.697.600	2.063.87.500	1.451.498.750	1.731.213.500
29	KOTA TEGAL	778.069.100	733.895.100	763.762.400	713.270.750	742.992.700	848.696.400	729.823.800	837.399.500	1.134.416.100	998.186.125	461.577.500	667.529.250
30	KAB. TEGAL	1.362.807.250	1.279.337.000	1.452.238.900	1.431.445.500	1.489.889.825	1.495.845.250	1.719.832.250	1.787.934.000	2.064.008.750	2.168.886.300	1.825.542.500	1.577.900.500
31	KAB. BREBES	764.674.000	512.178.000	589.119.500	533.647.000	700.341.000	669.104.750	608.263.000	810.464.000	921.969.750	972.242.000	842.622.000	775.702.500
32	KAB. BUNYU	346.978.000	369.895.000	366.807.000	360.005.750	377.911.500	454.244.000	374.832.000	543.377.500	558.733.000	652.374.400	329.888.000	437.331.000
33	KAB. TANJUNG	716.991.500	585.192.500	748.278.500	773.513.000	745.063.100	807.195.750	815.348.600	896.401.700	1.015.792.850	901.638.000	738.532.500	593.512.000
34	KAB. BANTUL	1.979.101.250	1.869.451.100	2.049.056.200	2.285.998.800	2.217.145.025	2.217.102.000	2.283.059.000	2.357.175.700	2.338.377.000	2.245.440.250	1.319.586.250	1.616.630.250
35	KAB. WONOGIRI	499.488.000	479.596.000	594.607.000	631.903.000	731.435.250	709.014.975	735.032.450	690.331.000	868.368.050	875.279.500	311.948.500	556.210.000
36	KAB. CILACAP	1.866.379.000	1.732.363.900	1.920.372.500	1.942.634.625	1.728.871.000	1.977.017.450	2.136.814.325	2.014.616.000	2.449.232.000	2.604.362.875	1.561.173.575	1.768.944.000
37	KAB. PURWALINGGA	623.024.000	622.634.000	730.349.000	704.115.800	790.131.500	827.077.750	812.247.500	987.812.500	1.116.835.000	1.231.150.000	748.146.750	767.657.500
38	KAB. PURWALINGGA	939.999.000	837.600.500	916.624.000	1.094.195.000	1.055.275.000	1.045.616.750	997.742.000	1.142.969.250	1.147.694.000	1.229.835.500	1.057.417.500	828.312.750
39	KAB. PURWALINGGA	931.730.750	932.282.900	966.260.000	1.012.842.000	1.178.522.625	1.041.296.125	838.020.000	1.097.720.000	1.130.755.000	1.021.777.500	811.565.000	779.925.000
40	KOTA MAGELANG	760.031.875	620.624.775	916.692.750	649.535.525	793.032.500	1.064.162.500	1.004.143.900	743.843.000	644.671.750	613.313.250	412.251.500	502.209.500
41	KAB. MAGELANG	1.606.275.000	1.326.367.000	1.720.401.000	1.572.656.000	1.806.331.750	1.751.462.800	1.608.434.400	1.784.152.900	1.623.692.250	1.751.486.950	1.432.383.900	1.140.218.150
42	KAB. PURWOREJO	893.667.000	727.498.900	864.453.000	926.574.500	1.006.753.000	909.745.275	994.349.450	1.074.217.200	1.836.150.850	1.721.047.025	1.212.031.650	942.606.175
43	KAB. PURWOREJO	511.271.500	585.409.000	725.521.000	694.707.500	725.331.775	710.794.950	634.833.050	904.552.000	785.703.250	928.427.000	746.705.000	516.008.750
44	KAB. BANGKALAN	58.893.500	62.011.000	101.450.500	92.118.500	97.306.000	97.229.500	95.505.000	106.560.000	115.720.000	149.495.000	131.515.000	78.150.000
45	KAB. TEMANGGUNG	639.276.400	699.581.800	902.711.000	876.333.700	785.412.700	855.115.900	822.731.550	976.129.400	804.480.850	1.093.435.600	657.045.850	547.172.550
46	KAB. WONOSOBO	354.288.000	531.412.000	561.028.500	606.839.000	747.166.000	707.189.250	753.715.000	695.144.000	587.701.250	766.298.500	699.917.000	502.130.000
	JUMLAH	61.301.677.400	63.716.893.602	76.128.102.075	75.042.289.400	72.806.282.700	74.661.907.850	72.256.585.025	75.753.573.525	80.826.867.925	82.862.471.600	59.952.605.600	53.906.161.225

LAMPIRAN 6

PERKEMBANGAN HARGA PRODUK BBM TAHUN 2001

Tanggal	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PERKEMBANGAN HARGA PRODUK BBM TAHUN 2002

Modal	Surat Pinjam	Pinjam	Pembayaran	Saldo	Intensitas	Indikator	Keterangan
01-Jan			1450	820	900	740	50% Harga Pasar
17-Jan	2200	2100	1480	1640	1510	1480	100% Harga Pasar
			1550	1230	1150	1110	75% Harga Pasar
01-Mar			1550	1640	1510	1480	100% Harga Pasar
				1270	1150	1120	75% Harga Pasar
01-Apr	2300	2200	1600	1690	1580	1500	100% Harga Pasar
				1310	1250	1240	75% Harga Pasar
03-May	2400	2300	1750	1740	1700	1670	100% Harga Pasar
				1410	1400	1390	75% Harga Pasar
01-Jun	2400	2300	1750	1890	1900	1860	100% Harga Pasar
				1410	1400	1390	75% Harga Pasar
01-Jul	2400	2300	1750	1900	1900	1870	100% Harga Pasar
				1320	1350	1320	75% Harga Pasar
01-Aug	2400	2300	1735	1750	1790	1760	100% Harga Pasar
				1290	1325	1300	75% Harga Pasar
01-Sep	2400	2300	1690	1720	1760	1730	100% Harga Pasar
				1390	1360	1340	75% Harga Pasar
01-Oct	2500	2400	1750	1840	1810	1780	100% Harga Pasar
				1520	1440	1420	75% Harga Pasar
01-Nov	2500	2400	1750	2030	1920	1890	100% Harga Pasar
				1650	1550	1520	75% Harga Pasar
01-Dec	2500	2400	1750	2220	2120	2080	100% Harga Pasar
				1530	1550	1510	75% Harga Pasar
				2030	2060	2000	100% Harga Pasar

PERKEMBANGAN HARGA PRODUK BBM TAHUN 2003

Mutual	Pertama Plus	Bunga	Perhitungan Portofolio	Nilai Solusi	Upstream	Downstream
02-Jan	2600	2300	1810	1970	1890	1860
21-Jan	2600	2300	1810	1800	1650	1650
01-Feb	2600	2300	1810	1800	1650	1650
01-Mar	2600	2300	1810	1800	1650	1650
			2100	2200	2100	2050
01-Apr	2600	2300	1810	1800	1650	1650
			2100	2200	2100	2050
01-Mei	2600	2300	1810	1800	1650	1650
			1980	1930	2080	2030
01-Jun	2600	2300	1810	1800	1650	1650
			1810	1800	1820	1790
01-Jul	2600	2300	1810	1800	1650	1650
			1830	1800	1730	1700
1-Aug	2600	2300	1810	1800	1650	1650
			1930	1800	1720	1710
01-Sep	2600	2300	1810	1800	1650	1650
			2100	1980	1910	1880
01-Okt	2600	2300	1810	1800	1650	1650
			2100	2040	2000	1950
1-Nov	2600	2300	1810	1800	1650	1650
			2030	1980	1930	1890
01-Des	2600	2300	1810	1800	1650	1650
			2080	2160	2050	1990

PERKEMBANGAN HARGA PRODUK BBM TAHUN 2004

(Mula)	(Tamat) Jan	(Terakhir) Des	(Peringkat)	(Jumlah)	(Sisa)	(Dibayar)	(M.Bayar)	(Aman)	(Kategori)
01-Jan	2600	2300	1810	1800	1650	1650	1560		Harga Eceran
01-Feb	2600	2300	2100	2200	2100	2050	1560		Harga Industri
01-Mar	2750	2450	1810	1800	1650	1650	1560		Harga Eceran
01-Apr	2750	2450	2100	2200	2100	2050	1590		Harga Industri
01-Mai	2750	2450	1810	1800	1650	1650	1560		Harga Eceran
01-Jun	2750	2450	2100	2200	2100	2050	1560	3014	Harga Industri
01-Jul	2750	2450	1810	1800	1650	1650	1560	6215	Harga Eceran
01-Agust	2750	2450	2100	2200	2100	2050	1600	6380	Harga Industri
01-Sep	2750	2450	1810	1800	1650	1650	1560	3179	Harga Eceran
01-Okt	2750	2450	2100	2200	2100	2050	1600	6391	Harga Industri
01-Nop	2750	2450	1810	1800	1650	1650	1560	3542	Harga Eceran
01-Des	2750	2450	2100	2200	2100	2050	1600	6237	Harga Industri
19-Des	4200	4000	1810	1800	1650	1650	1560	6248	Harga Eceran
			2100	2200	2100	2050	1600	4070	Harga Industri

PERKEMBANGAN HARGA PRODUK BBM TAHUN 2005

Bulan	Persediaan Gaji	Jumlah	Pendapatan	Keuntungan	Gedung	Tipe	Unit Baku	Hutang
03-Jan	4200	4000	1810 2100	1800 2200	1650 2100	1650 2050	1560 1600	Harga Eceran Harga Industri
01-Feb	4200	4000	1810 2100	1800 2200	1650 2100	1650 2050	1560 1600	Harga Eceran Harga Industri
01-Mar	4200	4000	2400 2870	2200 2790	2100 2700	2300 2660	2300 2300	Harga Eceran Harga Industri
14-Mar	4200	4000	2400 2870	2200 2790	2100 2700	2300 2660	2160 2300	Harga Eceran Harga Industri
01-Apr	4200	4000	2400 2870	2200 2790	2100 2700	2300 2660	2360 2360	Harga Eceran Harga Industri
01-Jul	4200	4000	2400 4060	2200 4940	2100 4740	2300 4560	2360 2900	Harga Eceran Harga Industri
01-Agust	4200	4000	2400 4640	2200 5490	2100 5240	2300 5240	2600 3150	Harga Eceran Harga Industri
01-Sep	5900	5700	2400 5160	2200 5600	2100 5350	2300 5130	2600 3150	Harga Eceran Harga Industri
01 Okt	5900	5700	4500 5160	2000 5600	4300 5350	- 5130	- 3150	Harga Premium, Minyak Tanah, Minyak Solar Perpres No. 55/2005 Harga Jual Pasar
8 Okt	5900	5700	4500	2000	4300	-	-	Harga Premium, Minyak Tanah, Minyak Solar Perpres No. 55/2005 Harga Industri Berdasarkan SK Dir PMS & Niaga No Kpts- 34/OF-000/0072005-S3
01-Nov	5900	5700	4500 5890	2000 6480	4300 6170	- 5940	- 3870	Harga Premium, Minyak Tanah, Minyak Solar Perpres No. 55/2005 Harga Jual Pasar
21-Nov	5600	5400	4500 5890	2000 6480	4300 6170	- 5940	- 3870	Harga Premium, Minyak Tanah, Minyak Solar Perpres No. 55/2005 Harga Jual Pasar
01-Des	5600	5400	4500 5150	2000 6480	4300 5340	- 5180	- 3680	Harga Premium, Minyak Tanah, Minyak Solar Perpres No. 55/2005 Harga Jual Pasar

LAMPIRAN 7
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR BARU
KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2001

NO.	KANTOR CABANG/KPPD/SAMSAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	KOT. SMG. WIL. GENUK	1.286	1.549	1.520	1.538	1.172	1.438	1.713	1.589	1.597	1.597	1.592	1.140
2	KOT. SMG. WIL. BYANIK	759	869	831	803	1.143	965	951	1.043	1.123	1.002	1.102	919
3	KOT. SMG. WIL. NGALIAN	547	615	611	572	510	632	705	740	771	728	681	98
4	KAB. KENDAL	698	569	508	656	632	699	850	931	1.144	1.311	1.363	1.069
5	KAB. DEMAK	624	496	535	499	505	527	688	621	701	689	863	536
6	KAB. GROBOGAN	490	515	562	524	566	537	568	593	759	780	789	489
7	KOT. SALATIGA	121	161	170	154	187	192	218	216	235	235	245	180
8	KAB. SEMARANG	515	416	435	435	438	547	591	607	559	646	658	540
9	KOT. SURAKARTA	904	1.028	1.191	1.153	1.149	1.270	1.220	1.454	1.288	1.212	1.092	854
10	KAB. SUKOHARJO	830	866	872	977	990	1.077	989	1.269	1.124	1.127	1.172	1.047
11	KAB. KARANGANYAR	570	569	639	693	654	745	742	828	951	996	959	782
12	KAB. WONOGIRI	315	288	347	396	355	353	354	426	523	625	525	480
13	KAW. PURWANTORO	48	63	41	49	56	111	113	167	124	166	196	149
14	KAB. KLATEN	1.019	921	1.004	976	981	1.056	1.027	1.096	1.170	1.146	1.134	907
15	KAW. PRAMBANAN	-	-	-	-	-	-	-	185	236	260	334	199
16	KAB. BOYOLALI	437	482	493	471	498	499	513	762	835	871	775	539
17	KAB. SRAGEN	668	593	790	720	835	811	970	1.099	899	1.215	1.363	984
18	KOT. PEKALONGAN	316	448	372	380	402	386	384	449	442	489	461	315
19	KAB. PEKALONGAN	622	477	418	466	422	469	530	561	695	614	746	623
20	KAB. BATANG	251	274	284	266	329	321	373	443	428	453	470	357
21	KAB. PEMALANG	382	519	544	450	521	486	540	712	568	784	824	575
22	KOT. TEGAL	256	336	278	304	303	348	342	354	320	353	377	377
23	KAB. TEGAL	696	755	652	640	686	730	702	1.014	865	899	991	692
24	KAB. BREBES	459	450	507	472	421	584	361	375	330	388	692	198
25	KAW. BUMAYU	84	91	83	92	5	115	118	143	142	147	150	112
26	KAW. LOSARI	-	-	-	-	-	-	246	356	313	289	265	183
27	KOT. MAGELANG	155	165	183	145	164	176	187	238	190	197	244	164
28	KAB. MAGELANG	480	403	446	360	392	465	503	634	684	722	881	556
29	KAB. TEMANGGUNG	235	223	192	165	267	186	205	372	806	659	584	338
30	KAB. PURWOREJO	269	310	295	251	302	306	423	429	412	476	578	259

LAMPIRAN 7 (Lanjutan)
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR BARU
KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2001

NO.	KANTOR CARANG/KPPD/SAMSAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
31	KAB. KEBUMEN	398	498	444	411	477	507	451	510	556	574	695	448
32	KAB. WONOSOBO	154	146	202	184	150	187	224	264	376	454	400	302
33	KAB. PATI	692	593	823	818	912	930	1.137	1.090	1.151	1.100	1.177	886
34	KAB. REMBANG	220	253	239	210	348	285	267	306	284	289	323	187
35	KAB. KUDUS	519	691	658	692	826	738	698	882	902	729	748	618
36	KAB. JEPARA	994	828	984	1.209	1.180	1.236	1.092	1.371	1.211	1.103	1.112	857
37	KAB. BLORA	204	172	264	236	260	254	210	271	256	232	289	163
38	KAW. CEPU	200	270	204	168	232	251	227	284	271	327	443	345
39	KAB. BANYUMAS	433	596	533	555	546	531	617	676	716	742	754	526
40	KAW. WANGON	198	198	200	169	214	209	201	224	284	262	290	256
41	KAB. PURBALINGGA	207	268	295	355	303	311	331	349	423	341	419	306
42	KAB. BANJARNEGARA	206	228	206	226	212	188	270	300	350	303	319	256
43	KAB. CILACAP	567	755	817	659	681	818	794	898	1.025	951	982	760
44	KAW. MAJENANG	169	187	175	163	191	184	253	330	289	298	301	261
	JUMLAH	19.197	20.134	20.847	20.662	21.417	22.660	23.898	27.461	28.328	28.781	30.358	21.832

LAMPIRAN 8
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR BARU
KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2002

NO.	KANTOR CABANG/KPPD/SAMSAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	KOT. SMG. WIL. GENUK	1.429	1.432	1.507	1.761	1.730	1.547	1.914	1.982	1.837	1.947	1.817	1.491
2	KOT. SMG. WIL. BYMNK.	987	933	1.125	1.217	1.288	1.022	1.165	1.206	1.304	1.324	1.323	1.051
3	KOT. SMG. WIL. NGALIAN	745	691	775	938	949	769	991	1.045	924	1.103	1.004	948
4	KAB. KENDAL	913	733	687	823	945	748	1.025	-	1.022	1.328	1.088	814
5	KAB. DEMAK	716	700	780	920	782	708	1.034	1.045	1.061	1.125	1.030	869
6	KAB. GROBOGAN	708	641	872	941	928	713	825	938	770	926	780	599
7	KOT. SALATIGA	194	234	163	275	303	246	259	284	281	277	345	189
8	KAB. SEMARANG	604	587	606	768	874	655	931	991	868	924	1.090	851
9	KOT. SURAKARTA	978	1.012	1.035	1.336	1.289	1.114	1.191	1.371	1.191	1.152	1.221	985
10	KAB. SUKOHARJO	1.117	938	1.078	1.256	1.321	1.012	1.222	1.345	1.200	1.287	1.629	1.006
11	KAB. KARANGANYAR	830	708	936	977	983	821	1.078	1.041	972	940	1.183	905
12	KAB. WONOGIRI	353	409	432	419	444	321	459	498	497	406	547	317
13	KAW. PURWANTORO	147	112	147	158	131	108	139	141	160	150	203	117
14	KAB. KLATEN	1.061	949	1.087	1.163	1.169	877	1.194	1.338	1.132	1.257	1.423	1.089
15	KAW. PRAMBANAN	203	204	220	234	198	148	213	251	240	300	329	236
16	KAB. BOYOLALI	624	523	598	733	782	549	792	830	818	851	933	720
17	KAB. SRAGEN	975	888	1.188	1.222	1.285	990	1.282	1.317	1.122	1.250	1.390	1.005
18	KOT. PEKALONGAN	351	332	388	376	400	342	443	483	359	446	440	373
19	KAB. PEKALONGAN	733	406	512	476	460	389	470	1.019	466	698	638	745
20	KAB. BATANG	334	351	379	371	384	371	546	546	402	483	516	423
21	KAB. PEMALANG	720	494	522	603	638	589	685	634	666	730	699	665
22	KOT. TEGAL	313	290	268	336	410	293	420	537	341	393	425	341
23	KAB. TEGAL	935	767	744	893	892	637	922	1.043	922	848	1.041	1.046
24	KAB. BREBES	368	330	274	262	313	241	421	359	345	395	397	282
25	KAW. BUMIAHU	181	127	117	112	135	112	201	149	179	144	217	157
26	KAW. LOSARI	258	252	207	250	281	208	380	315	295	271	338	213
27	KOT. MAGELANG	201	200	164	192	200	180	251	265	154	222	253	141
28	KAB. MAGELANG	625	587	525	663	555	532	692	743	538	767	898	561
29	KAB. TEMANGGUNG	267	214	238	217	262	255	346	353	371	481	436	312
30	KAB. PURWOREJO	420	377	378	389	382	338	451	449	355	422	431	362

LAMPIRAN 8 (Lanjutan)
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR BARU
KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2002

NO.	KANTOR CABANG/KPPD/SAMSAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
31	KAB. KEBUMEN	549	515	483	573	606	518	674	666	511	626	637	639
32	KAB. WONOSOBO	301	201	437	233	308	228	324	324	332	524	305	305
33	KAB. P A T I	928	733	1.012	1.152	1.394	1.082	1.263	1.809	1.174	1.219	1.265	1.041
34	KAB. REMBANG	314	245	292	396	506	382	421	343	362	341	405	355
35	KAB. KUDUS	726	683	731	932	1.090	968	951	1.241	1.117	930	1.105	801
36	KAB. JEPARA	1.290	754	898	1.096	1.253	933	1.318	1.416	1.208	1.394	1.583	1.196
37	KAB. BLORA	229	296	344	512	634	343	412	393	531	403	291	200
38	KAW. CEP U	355	337	363	393	525	292	459	381	309	287	257	204
39	KAB. BANYUMAS	581	618	620	749	834	794	941	928	768	1.007	960	719
40	KAW. WANGON	191	206	218	247	291	287	331	325	304	326	361	213
41	KAB. PURBALINGGA	361	281	348	392	441	349	447	494	415	539	477	495
42	KAB. BANJARNEGARA	266	252	329	329	357	329	398	462	305	457	460	377
43	KAB. CILACAP	750	637	902	954	1.001	993	1.149	1.271	868	1.105	1.104	892
44	KAW. MAJENANG	231	184	174	242	281	266	330	455	301	382	433	433
Jumlah		25.362	22.363	25.103	28.481	30.254	24.599	31.360	33.026	29.297	32.387	33.707	26.683

LAMPIRAN 9
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR BARU
KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2003

NO.	KANTOR CABANG/KPPD/SAMSAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	KOT. SMG. WIL. GENUK	1.656	1.426	1.024	1.774	1.797	1.982	2.022	2.309	2.012	2.522	2.196	2.668
2	KOT. SMG. WIL. BYMNK	1.304	1.025	1.471	1.221	1.338	1.413	1.467	-	1.467	1.902	1.500	1.918
3	KOT. SMG. WIL. NGALIAN	1.024	863	941	1.135	1.035	1.150	1.119	1.151	1.228	1.537	1.236	1.408
4	KAB. KENDAL	208	188	231	184	248	281	270	282	283	403	283	370
5	KAB. DEMAK	874	720	790	796	858	897	951	981	1.078	1.448	1.038	1.572
6	KAB. GROBOGAN	803	448	548	765	659	842	793	821	832	1.106	988	1.102
7	KOT. SALATIGA	748	639	788	941	927	885	1.143	1.154	1.129	1.344	1.114	-
8	KAB. SEMARANG	652	602	713	807	723	734	813	1.026	951	1.200	853	1.241
9	KOT. SURAKARTA	1.239	966	1.239	1.245	1.198	1.326	1.526	1.673	1.589	1.743	1.462	-
10	KAB. SUKOHARJO	1.231	1.058	1.159	1.109	1.156	1.216	1.570	1.473	1.559	1.702	1.755	-
11	KAB. KARANGANYAR	1.050	864	1.002	1.056	1.333	1.081	1.363	1.267	1.477	1.593	1.453	1.948
12	KAB. WONOGIRI	200	161	187	191	201	233	272	256	274	317	294	396
13	KAW. PURWANTORO	608	533	647	667	700	736	805	780	1.005	1.173	1.076	1.549
14	KAB. KLATEN	775	721	898	1.103	1.103	1.047	1.221	1.117	1.200	1.332	1.286	1.773
15	KAW. PRAMBANAN	1.000	857	974	941	946	1.096	1.089	1.088	1.241	1.401	1.286	1.757
16	KAB. BOYOLALI	407	346	435	389	392	694	455	528	515	598	648	693
17	KAB. SRAGEN	147	128	177	143	130	143	164	169	198	205	224	314
18	KOT. PEKALONGAN	701	595	726	871	906	964	1.024	1.121	838	1.693	1.282	1.691
19	KAB. PEKALONGAN	974	660	831	935	861	1.099	1.031	1.274	1.254	1.531	1.280	1.883
20	KAB. BATANG	1.327	858	1.198	1.272	1.450	1.688	1.355	1.438	1.428	1.893	1.686	2.180
21	KAB. PEMALANG	275	184	217	257	241	341	607	292	402	375	372	568
22	KOT. TEGAL	381	183	228	245	284	307	335	301	301	426	313	493
23	KAB. TEGAL	200	181	221	218	242	239	340	262	315	309	304	385
24	KAB. BREBES	405	262	289	269	338	387	565	579	637	701	530	620
25	KAW. BUMIYU	937	335	342	279	399	451	573	681	934	968	992	1.443
26	KAW. LOSARI	433	280	296	252	272	376	527	596	759	891	711	935
27	KOT. MAGELANG	850	387	488	510	619	395	664	756	996	934	973	1.141
28	KAB. MAGELANG	339	226	278	284	348	620	429	459	492	547	484	649
29	KAB. TEMANGGUNG	817	511	614	642	819	921	996	1.360	1.225	1.417	1.540	1.847
30	KAB. PURWOREJO	404	283	250	273	319	405	446	417	459	598	548	-

LAMPIRAN 9 (Lanjutan)
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR BARU
KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2003

NO.	KANTOR CABANG/KPPD/SAMSAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
31	KAB. KEBUMEN	206	114	130	144	140	202	208	261	340	399	385	-
32	KAB. WONOSOBO	313	190	230	224	251	300	432	388	377	457	455	-
33	KAB. P A T I	869	691	782	827	889	1.092	1.186	1.090	583	1.345	1.057	1.673
34	KAB. REMBANG	345	228	290	322	290	414	413	402	370	538	440	644
35	KAB. KUDUS	1.061	728	786	854	923	860	1.132	1.233	1.438	1.153	1.236	1.554
36	KAB. JEPARA	351	230	279	298	298	331	479	546	488	621	570	861
37	KAB. BLORA	484	381	415	516	508	544	739	680	717	934	812	943
38	KAW. C E P U	358	334	328	333	369	442	474	480	488	532	898	673
39	KAB. BANTUMAS	185	151	178	179	252	215	281	282	178	327	307	420
40	KAW. WANGON	679	486	449	506	572	534	750	806	896	1.173	1.124	1.182
41	KAB. PURBALINGGA	762	458	436	462	490	477	600	633	99	953	919	966
42	KAB. BANJARNEGARA	344	334	347	376	382	382	470	480	428	860	685	640
43	KAB. CILACAP	230	154	212	179	190	535	336	382	576	700	528	461
44	KAW. MAJENANG	253	200	222	306	310	224	302	322	404	457	468	-
JUMLAH		28.409	21.169	24.286	26.300	27.706	30.521	33.737	33.596	35.460	44.258	39.591	42.561

LAMPIRAN 10
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR BARU
KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2004

NO.	KANTOR CABANG/KPPD/SAMSAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	KOT. SMG. WIL. GENUK	2.305	2.151	2.491	2.634	2.329	2.966	2.643	2.527	2.672	2.726	2.122	2.521
2	KOT. SMG. WIL. BYMNK.	1.713	1.491	1.835	1.823	1.726	1.762	1.906	1.885	1.769	1.879	1.474	1.960
3	KOT. SMG. WIL. NGALIAN	1.327	1.178	1.500	1.322	1.261	1.411	1.479	1.441	1.353	1.564	1.203	1.530
4	KAB. KENDAL	410	355	419	375	345	455	466	483	492	503	366	508
5	KAB. DEMAK	1.358	1.095	1.233	1.282	1.146	1.328	1.332	1.308	1.527	1.797	1.338	1.844
6	KAB. GROBOGAN	6.704	1.088	848	957	769	1.061	1.083	1.247	1.240	1.760	1.314	1.282
7	KOT. SALATIGA	1.064	818	1.242	1.638	1.283	1.249	1.403	1.534	1.578	1.918	1.586	1.468
8	KAB. SEMARANG	1.140	859	1.130	1.113	1.054	1.167	1.306	1.343	1.343	1.536	1.374	1.369
9	KOT. SURAKARTA	1.940	1.700	1.867	1.858	1.738	1.791	2.042	1.964	1.899	2.102	1.669	1.898
10	KAB. SUKOHARJO	1.736	1.345	1.635	1.607	1.327	1.859	1.739	1.757	1.721	2.166	1.817	1.690
11	KAB. KARANGANYAR	1.639	1.271	1.368	1.771	1.455	1.421	1.687	1.617	1.678	2.014	1.823	1.613
12	KAB. WONOGIRI	295	263	239	278	254	270	305	292	331	389	397	332
13	KAW. PURWANTORO	1.181	901	956	1.165	1.099	1.077	1.205	1.194	1.383	1.706	1.495	1.188
14	KAB. KLATEN	1.127	990	1.349	1.317	1.298	1.318	1.477	1.411	1.407	1.778	1.500	1.569
15	KAW. PRAMBANAN	1.641	1.272	1.680	1.426	1.435	1.495	1.525	1.447	1.668	1.844	1.553	1.718
16	KAB. BOYOLALI	730	579	643	696	629	601	607	665	714	844	651	739
17	KAB. SRAGEN	238	221	192	233	189	198	201	245	260	302	270	253
18	KOT. PEKALONGAN	1.206	1.196	1.489	1.481	1.252	1.457	1.507	1.534	1.881	2.199	2.058	1.756
19	KAB. PEKALONGAN	1.554	1.166	1.422	1.515	1.268	1.704	1.468	1.410	1.656	1.845	1.197	1.382
20	KAB. BATANG	1.540	1.505	1.689	1.853	1.457	2.138	1.989	2.088	2.240	2.439	2.226	2.299
21	KAB. PEMALANG	574	450	457	832	561	689	752	714	766	861	731	1.074
22	KOT. TEGAL	435	446	466	439	540	608	617	667	485	832	604	621
23	KAB. TEGAL	365	306	403	436	423	489	659	525	425	647	442	531
24	KAB. BREBES	564	457	512	550	462	554	540	561	593	654	540	578
25	KAW. BUMIAYU	1.011	583	557	605	554	639	728	720	855	945	858	1.291
26	KAW. LOSARI	674	673	493	756	491	689	670	723	788	1.037	827	843
27	KOT. MAGELANG	1.089	636	783	820	819	856	880	1.039	1.012	1.225	963	1.354
28	KAB. MAGELANG	606	516	447	630	440	536	514	538	562	606	24	553
29	KAB. TEMANGGUNG	1.330	1.277	1.056	1.117	1.179	1.128	1.306	1.356	1.522	1.875	1.413	1.793
30	KAB. PURWOREJO	483	378	401	500	452	443	563	507	605	700	517	679

LAMPIRAN 10 (Lanjutan)
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR BARU
KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2004

NO.	KANTOR CABANG/KPPD/SAMSAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
31	KAB. KEBUMEN	408	276	375	361	276	277	317	319	382	462	399	471
32	KAB. WONOSOBO	426	417	409	507	501	574	689	658	682	890	674	949
33	KAB. P A T I	1.318	1.171	1.310	1.143	1.144	1.200	1.114	1.010	1.116	1.349	1.031	1.667
34	KAB. REMBANG	569	478	492	523	434	485	475	491	453	604	451	807
35	KAB. KUDUS	214	1.011	1.233	1.153	927	1.365	1.176	1.177	1.259	1.520	1.297	1.480
36	KAB. JEPARA	624	675	615	620	545	667	632	643	709	877	592	975
37	KAB. BLORA	786	756	808	702	792	695	759	746	862	1.112	892	1.140
38	KAW. C E P U	620	548	682	785	603	733	705	697	736	816	664	821
39	KAB. BANYUMAS	382	350	400	310	348	338	352	328	375	368	307	365
40	KAW. WANGON	1.109	1.038	1.131	1.075	1.264	1.131	1.156	1.045	1.132	1.527	1.429	1.233
41	KAB. PURBALINGGA	583	509	629	556	558	548	665	562	559	639	529	801
42	KAB. BANJARNEGARA	690	645	777	700	681	672	792	698	819	1.045	874	1.000
43	KAB. CILACAP	381	334	589	682	812	441	504	553	557	759	650	503
44	KAW. MAJENANG	328	397	427	413	424	405	436	431	459	537	526	484
	JUMLAH	46.417	35.771	40.679	42.559	38.544	42.890	44.371	44.100	46.525	55.198	44.667	50.932

LAMPIRAN 11
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR BARU
KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2005

NO.	KANTOR CABANG/KPPD/SAMSAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	KOTA SEMARANG I	2.197	2.287	2.963	2.776	3.006	2.898	2.908	3.109	3.348	2.734	2.335	2.181
2	KOTA SEMARANG II	1.592	1.812	2.061	2.113	2.079	2.155	2.029	2.307	2.270	2.042	1.706	1.699
3	KOTA SEMARANG III	1.385	1.426	1.877	1.671	1.716	1.714	1.671	1.843	1.833	1.658	1.295	1.447
4	KOTA SALATIGA	369	368	486	458	492	555	463	502	490	478	396	476
5	KAB. SEMARANG	1.175	1.224	1.578	1.443	1.477	1.690	1.687	1.776	1.913	2.024	1.651	1.487
6	KAB. KENDAL	1.024	1.195	1.468	1.529	1.476	1.737	1.703	1.903	2.013	2.115	1.712	1.452
7	KAB. DEMAK	1.107	1.390	1.771	1.821	1.841	1.767	1.876	1.943	1.899	1.957	1.631	1.126
8	KAB. GROBOGAN	1.035	1.058	1.467	1.648	1.605	1.502	1.701	1.681	2.024	1.989	1.561	1.357
9	KOTA SURAKARTA	1.808	1.893	2.128	1.911	1.895	1.914	1.960	2.143	1.936	1.828	1.311	1.462
10	KAB. SUKOHARJO	1.803	1.698	1.784	1.727	1.694	1.639	1.683	1.921	1.689	2.068	1.525	1.372
11	KAB. KLATEN	1.708	1.663	1.874	1.633	1.590	1.556	1.681	1.788	1.739	1.944	1.743	1.446
12	KAW. PRAMBANAN	294	275	337	286	251	316	297	303	343	414	343	306
13	KAB. BOYOLALI	1.328	1.159	1.341	1.275	1.333	1.225	1.291	1.465	1.459	1.624	1.479	959
14	KAB. SRAGEN	1.146	1.221	1.641	1.554	1.370	1.367	1.495	1.579	1.570	1.710	1.699	1.208
15	KAB. KARANGANYAR	1.588	1.560	1.722	1.643	1.516	1.414	1.522	1.649	1.506	1.869	1.537	1.305
16	KAB. WONOGIRI	452	512	553	619	517	611	613	632	644	772	646	588
17	KAW. PURWANTORO	179	246	195	259	238	236	237	304	257	373	400	218
18	KAW. BATURETNO	135	134	147	146	127	119	124	133	166	180	159	119
19	KAB. PATI	1.465	1.617	1.942	1.780	1.830	2.006	1.764	1.995	2.320	2.646	1.878	1.794
20	KAB. KUDUS	1.295	1.454	1.980	1.521	1.526	1.662	1.549	945	2.072	1.862	1.209	1.456
21	KAB. JEPARA	1.416	1.804	2.194	2.046	2.172	2.164	2.013	2.064	2.475	2.641	2.290	1.800
22	KAB. REMBANG	704	745	851	794	724	719	941	1.142	1.234	1.005	1.024	692
23	KAB. BLORA	504	598	729	788	735	647	871	870	853	1.032	675	607
24	KAW. CEPU	428	429	560	605	558	530	575	659	559	635	640	446
25	KOTA PEKALONGAN	473	468	588	595	560	615	684	691	801	790	662	639
26	KAB. PEKALONGAN	654	669	825	690	683	876	1.001	1.109	1.314	1.331	1.602	1.370
27	KAB. BATANG	653	561	841	811	774	868	937	1.150	1.618	1.524	1.322	954
28	KAB. PEMALANG	963	699	890	963	939	1.123	1.082	1.551	1.820	1.931	1.410	1.650
29	KOTA TEGAL	537	406	498	465	496	472	443	488	560	567	411	609
30	KAB. TEGAL	1.146	1.015	1.185	1.158	1.190	1.318	1.382	1.428	1.804	1.896	1.697	1.547

LAMPIRAN 11 (Lanjutan)
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR BARU
KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2005

NO.	KANTOR CABANG/KPPD/SAMSAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
31	KAB. BREBES	588	402	493	449	470	546	537	677	794	831	624	708
32	KAW. BUMIAYU	322	274	285	346	337	345	380	467	557	599	426	
33	KAW. TANJUNG	699	537	594	603	627	732	724	792	982	853	779	605
34	KAB. BANYUMAS	1.191	1.138	1.335	1.305	1.552	1.411	1.504	1.723	1.754	1.601	1.216	1.324
35	KAW. WANGON	466	469	491	584	591	663	618	650	756	710	504	568
36	KAB. CILACAP	1.300	1.138	1.150	1.456	1.367	1.557	1.693	1.652	1.865	1.886	1.431	1.417
37	KAW. MAJENANG	531	563	583	614	718	763	790	926	1.030	1.123	824	822
38	KAB. PURBALINGGA	826	664	791	870	904	847	863	979	1.033	1.073	1.059	823
39	KAB. BANJARNEGARA	678	608	679	660	780	714	709	785	911	900	818	685
40	KOTA MAGELANG	354	271	365	317	359	333	366	359	363	345	277	320
41	KAB. MAGELANG	1.115	1.014	1.210	1.050	1.130	1.133	1.067	1.264	1.230	1.439	1.300	1.011
42	KAB. KEBUMEN	717	606	742	740	733	741	819	1.001	1.764	1.645	1.257	906
43	KAB. PURWOREJO	472	453	520	524	538	544	542	725	657	749	708	526
44	KAW. BAGELAN	64	68	92	87	96	75	107	116	122	164	136	91
45	KAB. TEMANGGUNG	391	381	479	445	517	504	588	691	634	836	636	438
46	KAB. WONOSOBO	444	364	388	424	488	451	493	581	502	598	507	414
	JUMLAH	40.721	40.536	48.673	47.202	47.617	48.774	49.983	54.461	59.483	60.991	50.451	44.874

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,915 ^a	,837	,828	6548669535	1,845

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,23E+22	3	4,107E+21	95,776	,000 ^a
	Residual	2,40E+21	56	4,289E+19		
	Total	1,47E+22	59			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	V
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part		
1	(Constant)	,3E+10	8,8E+09		3,451	,001					
	X1	,4E+10	8,9E+09	,270	5,003	,000	,264	,556	,270	,998	1,
	X2	079739	021,896	,759	12,129	,000	,855	,851	,655	,744	1,
	X3	,4E+10	7,4E+09	-,198	-3,166	,002	-,588	-,390	-,171	,743	1,

a. Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations^a

Model		X3	X1	X2
1	Correlations	X3	1,000	,038
		X1	,038	1,000
		X2	,506	,032
	Covariances	X3	5,5E+19	1,9E+18
		X1	1,9E+18	4,7E+19
		X2	3,4E+14	2,0E+13

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	2,528	1,000	,01	,02	,01	,04
	2	,932	1,647	,00	,96	,00	,02
	3	,512	2,222	,01	,02	,03	,55
	4	,028	9,535	,99	,00	,96	,39

a. Dependent Variable: Y

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	Y
1	-3,726	5,3E+10

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

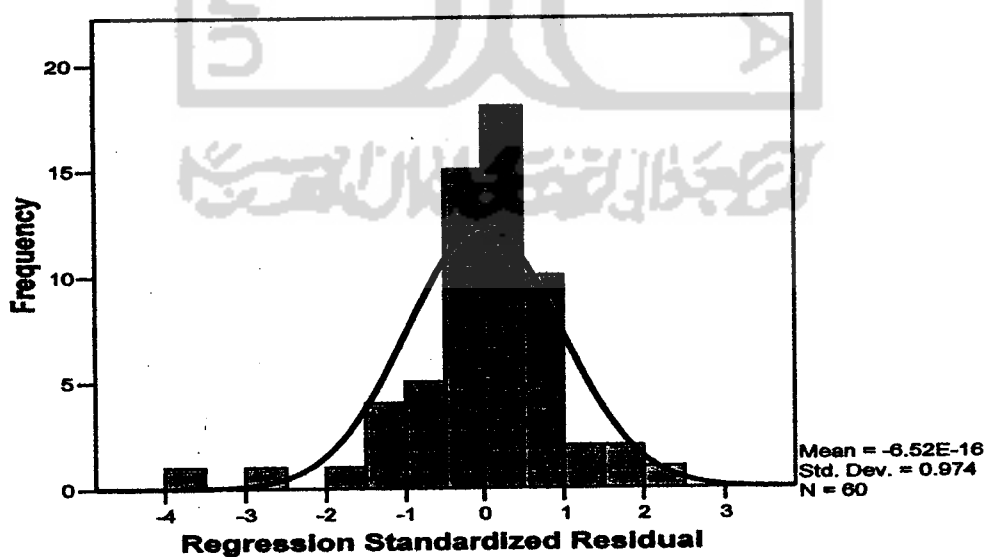
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,8E+10	8,1E+10	5,0E+10	1,445E+10	60
Std. Predicted Value	-1,483	2,151	,000	1,000	60
Standard Error of Predicted Value	9,5E+08	5,9E+09	1,5E+09	691677614,9	60
Adjusted Predicted Value	2,8E+10	8,0E+10	5,0E+10	1,423E+10	60
Residual	-2,4E+10	1,6E+10	,000	6380005937	60
Std. Residual	-3,726	2,394	,000	,974	60
Stud. Residual	-3,978	2,450	,002	1,012	60
Deleted Residual	-2,8E+10	1,6E+10	7,3E+07	6973522668	60
Stud. Deleted Residual	-4,654	2,570	-,011	1,079	60
Mahal. Distance	,254	46,841	2,950	6,017	60
Cook's Distance	,000	,552	,027	,094	60
Centered Leverage Value	,004	,794	,050	,102	60

a. Dependent Variable: Y

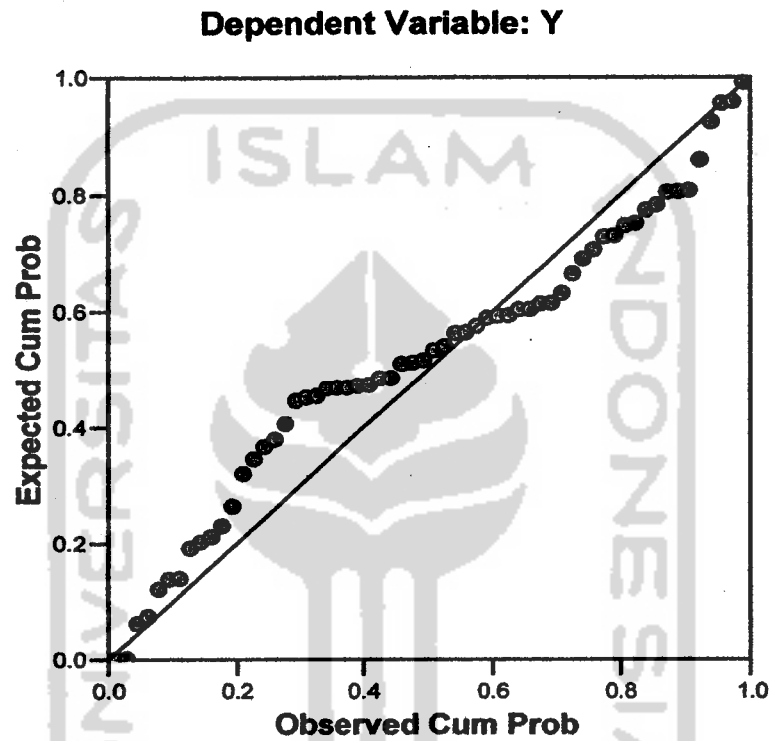
Charts

Histogram

Dependent Variable: Y



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

